

**ANALISIS PENGANGGURAN DI INDONESIA: PENGARUH UPAH
MINIMUM, EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING,
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA TAHUN 1990-2023**

(Skripsi)

Oleh

IRA NOVIKA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENGANGGURAN DI INDONESIA: PENGARUH UPAH MINIMUM, EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA TAHUN 1990-2023

Oleh

Ira Novika

Pengangguran merupakan masalah sosial-ekonomi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini menganalisis pengaruh upah minimum, ekspor, penanaman modal asing, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran dari tahun 1990 hingga 2023. Dengan menggunakan metode estimasi regresi linier berganda *Ordinary Least Square* (OLS), untuk mengoreksi bias dalam estimasi, digunakan pendekatan kesalahan standar *Newey-West HAC*. Upah minimum dan investasi asing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang menegaskan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas, investasi asing menciptakan lapangan kerja langsung melalui pembangunan fasilitas produksi dan efek pengganda ekonomi di sektor pendukung. Temuan yang paling mengejutkan adalah IPM yang memiliki pengaruh positif dan ekspor yang terbukti tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan modal manusia tidak sejalan dengan peluang kerja yang ada karena perubahan teknologi yang cepat, serta kebijakan peningkatan ekspor yang lebih berfokus pada intensitas modal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan, yaitu mempertahankan dan mengoptimalkan kenaikan upah minimum dan investasi asing secara terukur karena terbukti efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengarah ulang kebijakan strategi ekspor dari padat modal menjadi padat tenaga kerja, serta peningkatan indeks pembangunan manusia yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, khususnya di dunia bisnis dan industri.

Kata Kunci: Pengangguran, Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN INDONESIA: THE IMPACT OF MINIMUM WAGE, EXPORTS, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX FROM 1990-2023

By

Ira Novika

Unemployment is a socio-economic problem that can threaten the stability of the Indonesian economy. This study analyzes the effect of minimum wages, exports, foreign investment, and the human development index (HDI) on the unemployment rate from 1990 to 2023. Using the Ordinary Least Square (OLS) multiple linear regression estimation method, to correct bias in the estimation, the Newey-West HAC Standard Errors approach is used. Minimum wages and foreign investment have a significant negative effect on the open unemployment rate, confirming that wage increases can boost productivity, foreign investment creates direct jobs through the construction of production facilities and economic multiplier effects in supporting sectors. The most surprising finding of the HDI which has a positive effect and exports which are proven to be insignificant on the unemployment rate, this shows that human capital formation is not in line with existing job opportunities due to rapid technological changes, as well as export-increasing policies which focus more on capital intensity. The study provides important implications for policymakers, maintaining and optimizing minimum wage increases and foreign investment in a measurable manner because they have proven effective in reducing unemployment rates. Reorienting export strategies policy from capital-intensive to labor-intensive, increasing the human development index adjusted to technological developments, especially in the business and industrial world.

Keywords: *Foreign Direct Investment, Human Development Index, Export, Minimum Wage, Unemployment*

**ANALISIS PENGANGGURAN DI INDONESIA: PENGARUH UPAH
MINIMUM, EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING,
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA TAHUN 1990-2023**

Oleh

IRA NOVIKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENGANGGURAN DI
INDONESIA: PENGARUH UPAH
MINIMUM, EKSPOR, PENANAMAN
MODAL ASING, DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
TAHUN 1990-2023**

Nama Mahasiswa

: **Ira Novika**

No. Pokok Mahasiswa

: **2211021085**

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ida Budiarty., S.E., M.Si.**



Penguji I : **Prof. Dr. Toto Gunarto., S.E., M.Si.**



Penguji II : **Dr. I Wayan Suparta., S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Februari 2026**

BEBAS PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ira Novika

NPM : 2211021085

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengangguran di Indonesia: Pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia Pada Tahun 1990-2023” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak dapat terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 20 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000", "METERAI TEMPEL", and "988BCANX400648024".

IRA NOVIKA
NPM. 2211021085

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Ira Novika dilahirkan di Negara Batin, Way Kanan pada tanggal 13 Juni 2004, anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Thamrin dan Ibu Masroh.

Penulis mengawali Pendidikan formal pada tahun 2010 di SD Negeri 01 Srimenanti dan lulus pada tahun 2016,

selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 03 Negara Batin dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 02 Negeri Besar dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, Penulis telah mengikuti kewajiban akademik, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu penulis juga mengikuti kegiatan organisasi internal kampus, yaitu Himepa (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan) pada tahun 2023 menjadi Staff Bidang 1 Keilmuan & Penalaran, menjadi anggota aktif UKM-F EEC tahun 2022-2024, dan pada tahun 2024 penulis juga mengikuti program MBKM Mandiri Universitas Lampung, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku”

(Umar Bin Khattab)

“Setiap orang berhak untuk meraih mimpinya tanpa memandang status dari keluarga mana dia dilahirkan”

(Ira Novika)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengangguran di Indonesia: Pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia Pada Tahun 1990-2023”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemukan beberapa kesulitan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ida Budiarty., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 18 Februari 2026

Penulis

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahilillahirabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi kedepannya

Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu yang tercinta

Thamrin dan Masroh

Serta untuk keempat kakakku yang tersayang

Evan Toni, Tina Widana, Dewi Hartati, dan Khodry Gemilang

Terimakasih untuk keluarga besar, teman seperjuangan
Ekonomi Pembangunan 2022

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang penulis cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengangguran Di Indonesia: Pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia Pada Tahun 1990-2023”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Penulis memperoleh bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga atas kesempatan serta kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang telah tulus dan Ikhlas melancarkan jalan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik;
4. Ibu Zulfa Amalia, S.E., M.Si. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing Skripsi terimakasih telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan, memberikan arahan, perhatian, motivasi, dukungan, ilmu, serta saran kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ira minta maaf ibu jika selama menjadi bimbingan ibu ira buat salah, buat ibu kesal, dan menguji kesabaran ibu, ibu jaga kesehatan selalu ya.

6. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh kesabaran dan ketelitian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik;
7. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan arahan, saran, serta ilmu dengan penuh ketelitian dan perhatian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Ibu Dr. Asih Murwiati., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, serta ilmu dengan penuh ketelitian dan perhatian selama masa perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof Nairobi, Prof Ambya, Prof. Toto, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Deddy, Pak Thomas, Pak Yudha, Pak Mufti, Ibu Ida, Ibu Asih, Ibu Resha, Ibu Emi, Ibu Zulfa, Ibu Ratih, Ibu Betty, Ibu Tiara, Ibu Resha, Ibu Marselina, Ibu Dian, Ibu Vitri, Ibu Nindya, Ibu Rizka Serta seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan Pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
10. Bapak Elvie, Ibu Dike, Kiyay dan seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis;
11. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Thamrin beliau memang tidak berpendidikan tinggi beliau hanya tamatan SD/derajat namun beliau bekerja keras serta mendidik penulis dengan lemah lembut, penuh kesabaran, dengan dukungan dan berkat kerja keras beliau dapat mengantarkan penulis hingga menjadi seorang sarjana dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala doa, perjuangan dan segala usaha yang diberikan
12. Pintu surgaku, Ibunda Masroh. Terimakasih bu atas segala doa yang selalu dilantirkan di setiap sholat dan setiap saat. Berkat doa dan dukungan ibu maka penulis bisa sampai dititik ini. Terimakasih atas kesabaran, ketulusan dan kasih sayang selalu diberikan kepada penulis. Penulis tiada artinya tanpa dukungan dan doa dari ayah dan ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai menjadi sarjana;

13. Keempat kakakku tersayang, Pukuk, Wanti, Ayuk, Ani terimakasih ya atas segala dukungan, doa, dan hiburan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga kalian sehat dan sukses selalu, yang selalu menjadi panutan penulis;
14. Keluarga Besar Thamrin tercinta buntut, emi, abang, ayuk, ratu, kedua ponakanku: Fara dan Afqari serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bantuan dan do'a yang menghantarkan penulis hingga skripsi ini selesai;
15. Saudaraku, Sahabatku tercinta, Septiana Dwi Nurmala, Mully Dwinatasya, Najwa Tirtha Rayinda. Terimakasih ya ncep, kaka, mba sudah seperti saudara sekandung walau tidak sedarah. Terimakasih telah selalu membersamai penulis dari awal masuk kuliah, selalu memberikan dukungan, perhatian, bantuan, motivasi, saran, masukan semangat yang tiada henti. Terimakasih atas tempat untuk berkeluh kesah, terimakasih atas pelukan ternyaman bagi penulis dan selalu ada di masa-masa sulit. Ncep, kaka, mba selalu bersama disetiap proses kedepannya yaa, jangan pernah tinggalkan penulis, selalu saling memberi dukungan ya, selalu jadi orang terbaik di hidup penulis ya, sukses bersama ya untuk kita berempat;
16. Keenam sahabatku (ayam geprek cute) yang telah menjadi keluarga, septi, sopi, atri, putri, retno, dan lira. Terimakasih ya yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan, terimakasih atas motivasi dan diskusi yang telah kita bagi selama ini. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan kita dengan baik, kalian adalah bagian dari perjalanan yang terbaik dalam hidup aku;
17. Saudaraku marimas smanda tomi, lalak, lilik, terimakasih dukungan dan persahabatan yang tak terlupakan. Kalian adalah keluarga yang selalu ada;
18. Keluarga besar barudak KKN, terimakasih atas kontribusi dan kerja sama yang kita lakukan, semoga kita semua sukses dimasa depan;
19. Semua teman-teman sebimbing skripsi ibu ida, terimakasih telah menjadi rekan diskusi, saran, kritik, dan motivasi yang telah kita bagi. Semoga kita semua bisa menyelesaikan skripsi dengan baik;

20. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama di Ekonomi Pembangunan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
21. Terakhir untuk diriku, terimakasih telah berjuang sejauh ini dan bertahan. Terimakasih atas kesabaran dan ketekunanmu, kamu bisa melakukannya, dan kamu akan mencapai tujuanmu;

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis

Ira Novika
NPM 2211021085

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Konsep Pengangguran.....	17
2.1.2 Upah Minimum	28
2.1.3 Ekspor.....	32
2.1.4 Penanaman Modal Asing.....	36
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	39
2.2 Hubungan Antar Variabel	43
2.2.1 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	43
2.2.2 Hubungan Ekspor terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	44
2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	45
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	46
2.3 Tinjauan Empiris	47
2.4 Kerangka Berpikir	49

2.5	Hipotesis Penelitian	51
III.	METODE PENELITIAN	51
3.1	Metode Penelitian.....	51
3.2	Jenis dan Sumber Data	51
3.3	Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	52
3.4	Metode Pengumpulan Data	54
3.5	Metode Estimasi dan Analisis Data	54
3.5.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	55
3.5.2	Analisis Regresi Linear Berganda OLS (<i>Ordinary Least Square</i>) dengan HAC atau <i>Newey West Standar Error</i>	57
3.5.3	Pengujian Statistik	58
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1	Deskripsi Data Penelitian	60
4.2	Hasil Penelitian.....	60
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	60
4.2.2	Pengujian Asumsi Klasik.....	62
4.2.3	Pengujian Statistik	70
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA.....	93
	LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Persentase Rata-Rata Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1990-2023	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data	52
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Metode Breusch-Pagan-Godfrey ..	64
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi	65
Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode HAC atay Newey West Standar Error	66
Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Ordinary Least Square (OLS) dengan HAC atau Newey West Standard Error	68
Tabel 10. Hasil Uji Statistik F	70
Tabel 11. Hasil Uji Statistik t Parsial	71
Tabel 12. Nilai Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Tingkat Upah Minimum di Indonesia Tahun 1990-2023	5
Gambar 2. Persentase Ekspor di Indonesia Tahun 1990-2023	7
Gambar 3. Tingkat Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 1990-2023.....	9
Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2023	11
Gambar 5. Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat	20
Gambar 6. Keseimbangan Pasar Barang	22
Gambar 7. Keseimbangan Pasar Uang	23
Gambar 8. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja	24
Gambar 9. Kurva IS-LM	26
Gambar 10. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran.....	30
Gambar 11. Model Teori Heckscher Ohlin	34
Gambar 12. Kerangka Berpikir Penelitian	50
Gambar 13. Hasil Uji Normalitas dengan Metode Jarque-Berra (Uji J-B).....	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar negara berkembang di dunia. Fenomena ini tidak hanya menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan pekerja dan kebutuhan akan sumber daya manusia, tetapi juga menunjukkan kompleksitas hubungan antara berbagai faktor ekonomi makro yang saling berinteraksi dalam sistem perekonomian negara. Angka pengangguran merupakan parameter penting dalam mengukur kondisi sosial dan ekonomi suatu negara, di mana penurunan angka pengangguran mencerminkan membaiknya situasi ekonomi. Dalam teori ekonomi klasik, tingkat pengangguran 4% merupakan batas toleransi ideal yang mencerminkan kondisi *natural unemployment*. Pada tingkat ini, 96% dari mereka yang ingin bekerja telah mendapatkan pekerjaan, sementara 4% sisanya merupakan pengangguran alamiah yang disebabkan oleh faktor friksional dan struktural (Mankiw, 2019). Tingkat pengangguran di atas 4% mengindikasikan adanya masalah dalam perekonomian yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat.

Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan pengangguran yang tingkat keparahannya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar negara lain di kawasan ASEAN. Data (ILO, 2023), menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada periode 2015-2023 mencapai 5,8%, secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Thailand 1,2%, Vietnam 2,3%, dan Malaysia 3,4%. Yang lebih mengkhawatirkan, pengangguran pemuda Indonesia (usia 15-24 tahun) mencapai 15,2% tertinggi kedua di ASEAN setelah Filipina jauh melampaui rata-rata regional sebesar 10,1%. Kondisi ini menjadi permasalahan mengingat Indonesia memiliki bonus demografi dengan 70% populasi berada di usia produktif,

yang seharusnya menjadi aset strategis pembangunan ekonomi. Persistensi pengangguran yang tinggi di tengah potensi demografis mengindikasikan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pasar tenaga kerja Indonesia yang memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhinya.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran yang ambisius dalam upaya menangani permasalahan pengangguran. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,40-5,30% pada tahun 2024 (Bappenas, 2020). Namun, pencapaian target ini menghadapi tantangan signifikan akibat pandemi *Covid-19* yang mendorong pengangguran melonjak menjadi 7,07% pada tahun 2020, jauh melampaui target yang ditetapkan. Meskipun terjadi perbaikan pascapandemi dengan pengangguran turun menjadi 5,32% pada tahun 2023, capaian ini masih berada di batas atas target RPJMN yang menunjukkan persistensi struktural pengangguran (BPS, 2023). Menatap periode RPJMN 2025-2029, pemerintah menetapkan sasaran lebih agresif dengan target pengangguran sebesar 3,80-4,70% pada tahun 2029, yang mensyaratkan penciptaan lapangan kerja produktif rata-rata 3 juta per tahun (Bappenas, 2025).

Berdasarkan (BPS, 2023), angka pengangguran di Indonesia mengalami pergerakan fluktuatif yang cukup berarti sepanjang kurun waktu 1990-2023. Pada era orde baru, Indonesia pernah mencapai tingkat pengangguran yang sangat rendah sekitar 2,55% pada tahun 1990, mencerminkan stabilitas ekonomi dan tingginya aktivitas sektor padat karya pada periode tersebut. Namun, krisis ekonomi Asia 1997-1998 menjadi titik balik yang mengubah lanskap ketenagakerjaan secara fundamental. Gelombang kebangkrutan perusahaan melanda berbagai sektor, produksi terhenti, dan pemutusan hubungan kerja massal tidak terhindarkan. Kondisi ini memicu lonjakan pengangguran yang terus meningkat sejak 1998 dan mencapai puncaknya pada tahun 2005 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,24% angka tertinggi dalam dua dekade terakhir. Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat, ditambah restrukturisasi industri serta rendahnya kemampuan sektor padat karya untuk menyerap tenaga kerja, memperpanjang dampak struktural krisis terhadap kesempatan kerja di Indonesia (Rasyida, 2021).

Tabel 1. Persentase Rata-Rata Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1990-2023

Tahun	Rata-Rata TPT (%)
1990-1995	3,27%
1996-2001	5,92%
2002-2007	9,87%
2008-2013	7,20%
2014-2019	5,62%
2020-2023	6,2%

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 1990-2023 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional maupun global. Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran dan menurunkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dengan drastis. Dampak struktural dari krisis ini terus dirasakan hingga pertengahan dekade 2000-an, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai level tertingginya, menunjukkan bahwa krisis tidak hanya menimbulkan kontraksi ekonomi jangka pendek tetapi juga meninggalkan konsekuensi jangka panjang terhadap pasar tenaga kerja. Fenomena ini mencerminkan adanya *hysteresis unemployment*, yaitu kondisi dimana pengangguran tidak kembali ke tingkat pra-krisis (2,55% tahun 1990) meskipun ekonomi telah pulih, yang mengindikasikan terjadinya kerusakan struktural dalam pasar tenaga kerja Indonesia.

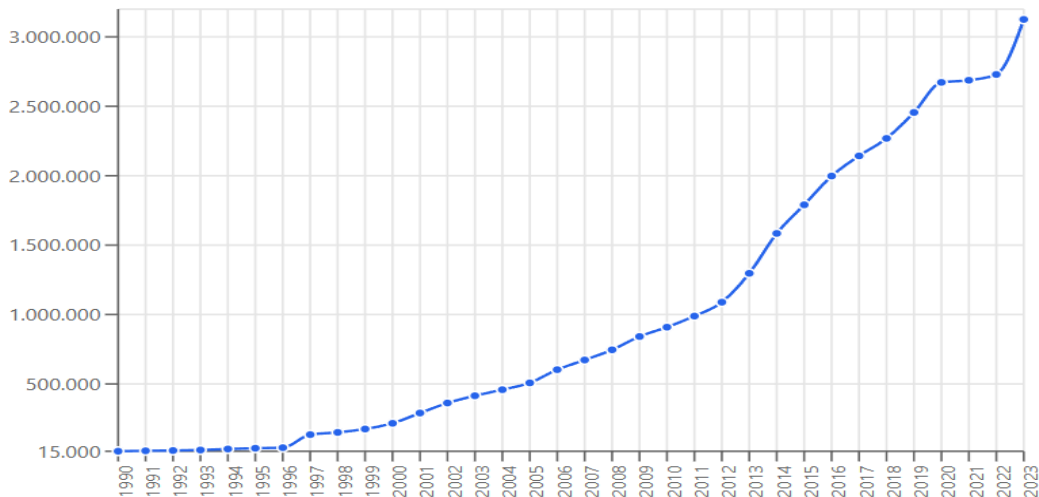
Memasuki periode 2000-an, Indonesia mulai memperlihatkan indikasi pemulihan perekonomian yang didukung oleh reformasi kebijakan dan peningkatan aktivitas ekspor, sehingga pengangguran secara bertahap menurun. Penurunan ini semakin terlihat pada periode 2010-2019 seiring dengan pembangunan infrastruktur masif dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Akan tetapi, kecenderungan positif tersebut kembali mengalami gangguan akibat pandemi *Covid-19* pada periode 2019-2021. Pembatasan aktivitas perekonomian serta penurunan permintaan pasar global kembali memberikan tekanan pada pasar kerja, menyebabkan pengangguran

melonjak kembali. Setelah pandemi mereda, pengangguran mulai menurun seiring pemulihan aktivitas ekonomi dan dukungan investasi.

Secara keseluruhan, meskipun pengangguran secara agregat telah kembali menurun pascapandemi, fluktuasi historis dan persistensi pengangguran di Indonesia menegaskan bahwa pasar tenaga kerja masih memiliki masalah struktural yang perlu diatasi. Tantangan krusial yang perlu ditonjolkan adalah tingginya pengangguran di kalangan kelompok usia muda (15-24 tahun), yang tingkatannya jauh melampaui rata-rata nasional (Dewi & Sirait, 2024). Kondisi ini menciptakan risiko besar bagi keberhasilan pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia dan berpotensi menjadi salah satu penyebab utama negara terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (*middle-income trap*).

Menurut teori ekonomi makro, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang saling berkaitan, di antaranya upah minimum, ekspor, penanaman modal asing (PMA), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pemahaman mendalam tentang hubungan dinamis antar variabel ini menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dalam menangani permasalahan pengangguran yang persisten di Indonesia.

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas terendah pembayaran upah kepada pekerja dalam suatu wilayah atau sektor tertentu. (Saputri & Sitorus, 2025) variabel ini penting karena berkaitan erat dengan Teori Upah Minimum yang menjelaskan bahwa tingkat upah minimum bukan sekadar berperan sebagai kompensasi untuk tenaga kerja, melainkan juga mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja dan keputusan produksi perusahaan. Menurut teori ini, kenaikan upah minimum memiliki dampak ganda: dari sisi pekerja dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih baik, namun dari sisi perusahaan dapat meningkatkan biaya produksi yang berpotensi mempengaruhi keputusan penyerapan pekerja. Dalam Indonesia, peningkatan upah minimum juga memiliki dampak makroekonomi yang signifikan karena mampu meningkatkan kemampuan beli masyarakat serta mendorong konsumsi domestik, yang kemudian merangsang permintaan agregat dan membuka lapangan pekerjaan baru (Rama, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Gambar 1. Tingkat Upah Minimum di Indonesia Tahun 1990-2023

Perkembangan upah minimum di Indonesia sepanjang periode 1990-2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Krisis Moneter Asia tahun 1997-1998 menjadi titik balik yang mengubah kebijakan pengupahan secara fundamental. Lonjakan upah minimum terjadi sebagai respons terhadap inflasi tinggi dan melemahnya nilai tukar rupiah untuk melindungi daya beli pekerja. Namun, kondisi ekonomi yang mengalami keterburukan menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu membayar upah tersebut dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Memasuki era 2000-an hingga 2019, kenaikan upah minimum cenderung lebih stabil dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha industri padat karya yang terbebani biaya produksi. Pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 membawa dinamika baru dimana pemerintah memberikan kebijakan khusus dengan memperbolehkan penyesuaian upah minimum di beberapa daerah untuk meringankan beban perusahaan.

Penelitian empiris mengindikasikan bahwa relasi upah minimum dan pengangguran bersifat kompleks. (Marliana, 2022) mengidentifikasi bahwa peningkatan upah minimum memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, terutama industri padat karya. Perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja atau bertransisi ke teknologi hemat tenaga kerja untuk menjaga

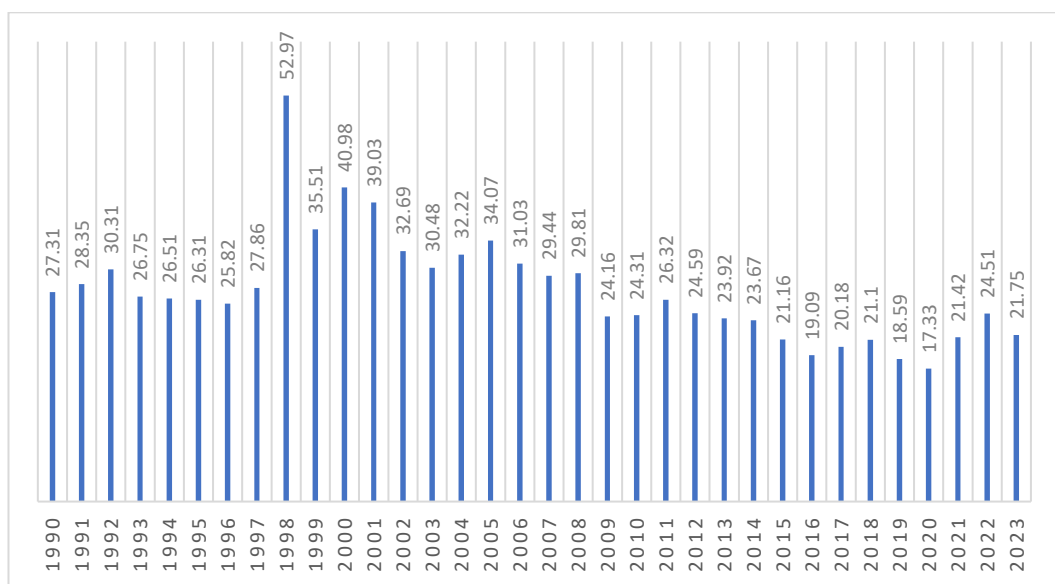
keuntungan. Sebaliknya, (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022) memperlihatkan bahwa kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang jika diikuti peningkatan produktivitas. Upah lebih tinggi meningkatkan motivasi kerja, mengurangi pergantian karyawan, dan menarik pekerja berkualitas. Perbedaan dampak ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum sangat ditentukan oleh karakteristik struktural sektor industri, tingkat adopsi teknologi, serta kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan biaya operasional yang meningkat.

Pengaruh upah minimum terhadap pengangguran sangat dipengaruhi oleh daya penyesuaian sektor industri, struktur ekonomi dalam negeri, serta kapabilitas perusahaan dalam menyerap lonjakan biaya tenaga kerja. Fenomena dualisme pasar tenaga kerja juga menjadi pertimbangan penting, dimana kenaikan upah minimum di sektor formal dapat mendorong perpindahan pekerja ke sektor informal yang tidak memiliki jaminan upah dan perlindungan sosial (Alviro *et al.*, 2025). Kebijakan upah minimum juga memiliki implikasi terhadap daya saing industri Indonesia di pasar global, dimana kenaikan upah tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dapat mengurangi daya saing produk ekspor dan menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor berorientasi ekspor (Kurniawan & Samsuddin, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini akan memberikan masukan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan upah minimum yang tidak hanya menjaga kesejahteraan pekerja namun juga tetap memelihara stabilitas ketenagakerjaan serta daya kompetitif industri nasional.

Ekspor memprediksi bahwa keterbukaan perdagangan dapat mengurangi pengangguran, melalui pembukaan peluang pekerjaan di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Ekspor merujuk pada jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa domestik yang dijual Indonesia ke pasar global, peningkatan aktivitas Ekspor mencerminkan tingginya permintaan internasional terhadap produk-produk Indonesia. Berdasarkan Teori Heckscher-Ohlin (HO), negara seperti Indonesia yang berlimpah faktor produksinya berupa tenaga kerja (padat karya) akan unggul dalam memproduksi dan mengekspor barang-barang padat karya tersebut. Dengan demikian, peningkatan Ekspor akan mendorong ekspansi

kapasitas produksi dan meningkatkan penyerapan pekerja di sektor-sektor yang ditopang oleh ekspor.

Pemanfaatan Ekspor sebagai variabel didukung oleh temuan (Susanti, 2019), yang memperlihatkan bahwa tingkat ekspor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan pekerja di sektor industri Indonesia. Peningkatan Ekspor memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan mengakses pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan secara langsung menciptakan peluang kerja baru.



Sumber : Data World Bank, 2023

Gambar 2. Persentase Ekspor di Indonesia Tahun 1990-2023

Perkembangan ekspor Indonesia, memperlihatkan fluktuasi yang erat kaitannya dengan perubahan struktur ekonomi global dan dinamika industri domestik. Pada awal dekade 1990-an, liberalisasi perdagangan dan meningkatnya permintaan ekspor hasil manufaktur meningkatkan pertumbuhan ekspor Indonesia dan berkontribusi besar pada penyerapan pekerja di sektor padat karya. Namun, Krisis Moneter Asia tahun 1997-1998 menimbulkan tekanan signifikan terhadap kinerja ekspor akibat melemahnya nilai tukar dan menurunnya daya saing industri nasional. Memasuki era 2000-an, ekspor kembali tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi global serta peningkatan harga perusahaan. Meski demikian, periode setelah 2012 menunjukkan kecenderungan stagnasi ekspor seiring dengan perlambatan ekonomi

dunia dan meningkatnya tekanan proteksionisme, yang berdampak pada keterbatasan penciptaan lapangan kerja baru di sektor berorientasi ekspor.

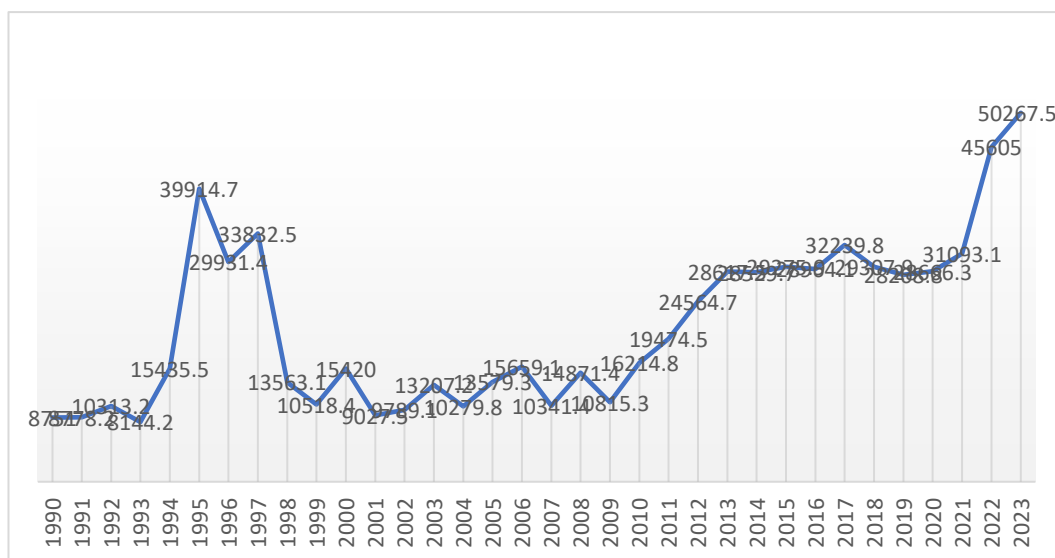
Secara keseluruhan, dinamika ekspor Indonesia selama lebih dari tiga dekade terakhir mencerminkan keterkaitan yang kuat antara ekspor dan kondisi ketenagakerjaan. Ekspansi Ekspor melalui perluasan produksi dan investasi merupakan mekanisme penting dalam mendukung penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, penurunan atau stagnasi ekspor menjadi indikasi perlambatan aktivitas industri dan pelemahan daya serap tenaga kerja domestik (Pramesti, 2023).

Penelitian dari (Amrulloh, 2023) yang menganalisis keterbukaan perdagangan terhadap tingkat pengangguran di kawasan ASEAN, menjelaskan bahwa arah pengaruh keterbukaan perdagangan bervariasi antarnegara. Namun, secara umum disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan mampu menurunkan pengangguran apabila didorong oleh peningkatan ekspor yang memperluas lapangan kerja, sementara dapat meningkatkan pengangguran jika impor lebih dominan dan menekan industri domestik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis variabel Ekspor sebagai faktor yang diharapkan memiliki peran signifikan dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia, sejalan dengan prediksi Teori Heckscher-Ohlin (HO).

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan membuka peluang kerja. Dalam perspektif Teori Investasi Keynes, investasi sangat krusial untuk mencapai kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Keynes dalam (Djamin, 2020) berpendapat bahwa ketika tingkat kecenderungan mengonsumsi (*Marginal Propensity to Consume*) masyarakat rendah, terjadi selisih antara produksi nasional dan konsumsi. Kondisi ini menuntut adanya tambahan investasi agar potensi pengangguran tidak timbul.

Investasi termasuk PMA, berperan penting dalam menekan tingkat pengangguran dengan menstimulasi permintaan agregat dan memperluas kapasitas produksi. PMA dipandang sebagai aktivitas untuk mendapatkan pendanaan yang dapat digunakan dalam kegiatan perekonomian, seperti proyek yang berkemampuan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dampak pada penyelesaian sejumlah permasalahan ekonomi termasuk pengangguran (Firmansyah *et al.*, 2023). Masuknya PMA diharapkan mampu membuka industri baru dan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja.



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023

Gambar 3. Tingkat Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 1990-2023

Berdasarkan gambar Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia, terbukti dari tren pergerakan PMA yang cenderung meningkat, mencerminkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan prospek pasar domestik. PMA menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Fenomena yang terlihat adalah bahwa peningkatan investasi asing ini tidak selalu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang sepadan. Hal ini disebabkan sebagian besar PMA cenderung berfokus pada sektor-sektor berteknologi tinggi dan padat modal yang memiliki kebutuhan tenaga kerja minim. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh PMA terhadap pengangguran sangat bergantung pada arah alokasi dan kualitas investasi (Fitrahwaty *et al.*, 2022).

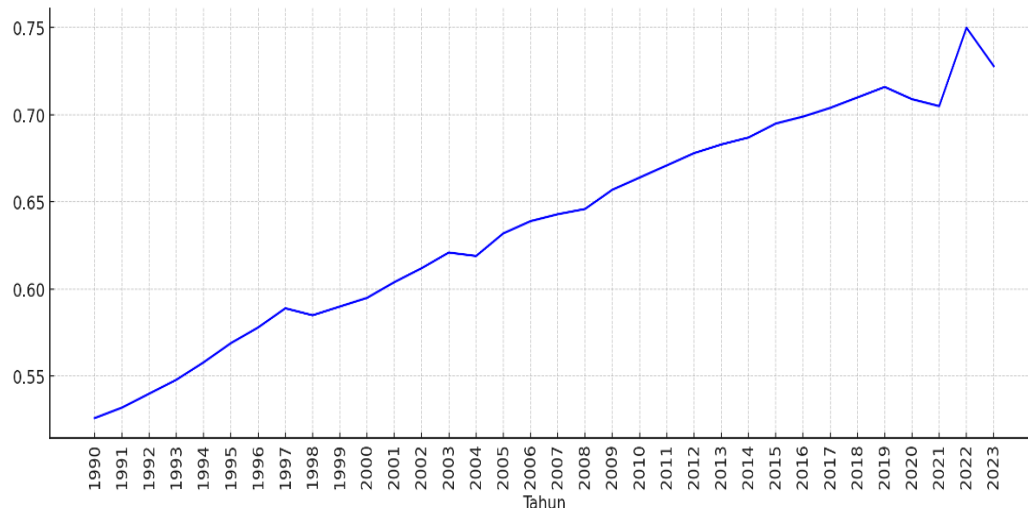
Kualitas investasi ini selaras dengan Teori Keynes, yang menegaskan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh proyeksi keuntungan di masa mendatang (*marginal efficiency of capital*) dan tingkat bunga. Agar PMA efektif menekan pengangguran, investasi tersebut harus efisien dan diarahkan pada sektor produktif

serta industri padat karya. Hal ini bertujuan agar peningkatan PMA dapat meningkatkan kapasitas produksi dan secara langsung menyerap tenaga kerja lokal (Larasati Erlynda Rizky, 2023). Dengan demikian, arah kebijakan investasi pemerintah seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan arus penanaman modal asing, tetapi juga diarahkan untuk menjamin bahwa investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja secara nyata serta berkontribusi terhadap distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai ukuran komprehensif untuk meninjau mutu pengembangan individu melalui tiga aspek utama, yakni derajat kesehatan, pencapaian pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dalam konteks ketenagakerjaan, IPM menjadi indikator yang penting karena menggambarkan kemampuan sumber daya manusia untuk berperan secara efektif dan produktif di pasar kerja. Menurut *human capital theory* yang dipaparkan (Becker, 1965), penempatan biaya pada sektor sekolah dan kesehatan akan memacu kinerja tiap individu, sehingga berimplikasi pada meluasnya peluang kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi serta kondisi kesehatan yang baik cenderung lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja, sehingga kemampuan berkompetisi dalam mendapatkan posisi kerja yang sesuai menjadi lebih kuat (Solihah & Arisetyawan, 2025).

Keterkaitan antara IPM dan tingkat pengangguran tidak senantiasa berpola searah serta dapat bervariasi tergantung kondisi struktural ekonomi. Penelitian (Astrid & Soekapdjo, 2020) menunjukkan bahwa naiknya nilai IPM biasanya memiliki pengaruh terhadap berkurangnya jumlah pengangguran, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia memperluas peluang individu untuk mengakses pasar kerja. Sebaliknya, (Qamariyah *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia belum secara otomatis berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Kondisi ini terjadi karena kecepatan penyediaan lowongan pekerjaan belum bisa menyamai kenaikan stok pekerja yang menamatkan jenjang sekolah lebih tinggi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh IPM terhadap pengangguran sangat ditentukan oleh kemampuan sistem ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja produktif

yang sesuai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh sebab itu, analisis mendalam terhadap pengaruh IPM menjadi penting untuk memahami dinamika pengangguran di Indonesia.



Sumber: United Nations Development Programme (UNDP), 2023

Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2023

Perkembangan IPM Indonesia selama periode 1990-2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan manusia yang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan ini didorong perbaikan ketersediaan pendidikan yang diperluas melalui pelaksanaan program wajib belajar, serta penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun mengalami perlambatan pada periode krisis ekonomi 1998 dan pandemi *Covid-19*, IPM Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan cepat kembali ke jalur pertumbuhan positif, menandakan semakin kuatnya fondasi pembangunan manusia nasional.

Pencapaian IPM menunjukkan perbaikan, tantangan kesenjangan kualitas SDM antarwilayah masih menjadi perhatian serius. (Sulistiana *et al.*, 2025) menemukan perbedaan IPM antar provinsi menciptakan ketidakmerataan kesempatan kerja, dan berkontribusi pada tingginya pengangguran struktural di daerah dengan IPM rendah. (Mukaromah *et al.*, 2023) menyatakan variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan dampak yang bermakna terhadap

peningkatan IPM. Oleh karena itu, perbaikan IPM harus disertai dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta berfokus pada penyediaan lapangan kerja yang bersifat produktif di seluruh daerah Indonesia, sehingga manfaat IPM dalam menekan tingkat pengangguran dapat terealisasi secara optimal.

Tingginya tingkat pengangguran yang bersifat menetap memicu beragam permasalahan sosial dan ekonomi yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia paling dominan terjadi pada kelompok usia muda 15–24 tahun, dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pengangguran nasional (Padillah & Saputra, 2024). Kondisi ini menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan memaksa pemerintah Indonesia meluncurkan program bantuan sosial dalam skala besar-besaran seperti kartu Prakerja, bantuan langsung tunai, dan berbagai skema perlindungan sosial lainnya. Jika kondisi pengangguran tinggi ini terus dibiarkan, Indonesia akan kehilangan momentum bonus demografi dan berpotensi jatuh ke *middle-income trap*. Persistensi pengangguran di atas 5% dapat mengurangi 2-3% pertumbuhan PDB potensial hingga 2030, menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi, dan meningkatkan beban fiskal pemerintah secara tidak *sustainable*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggabungkan empat variabel makroekonomi sekaligus Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dalam satu model analisis yang komprehensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung hanya memfokuskan analisis pada satu atau dua variabel secara terpisah. Dengan mengombinasikan seluruh variabel tersebut, penelitian ini mampu menangkap keterkaitan yang lebih kompleks antarvariabel serta implikasinya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Kedua, penelitian ini menggunakan data jangka panjang dari tahun 1990 hingga 2023, meliputi data negara Indonesia. Penggunaan *time series* jangka panjang ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika ekonomi yang lebih luas, termasuk upah minimum, perubahan kebijakan perdagangan, aliran penanaman

modal asing dan tingkat kesejahteraan hidup, yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian dengan periode yang lebih singkat. Hal ini relevan secara teori karena Teori Keynesian menekankan bahwa variabel makroekonomi, seperti investasi memiliki efek jangka panjang terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengangguran.

Ketiga, penelitian ini juga didukung oleh landasan teori ekonomi makro. Berdasarkan Teori Upah Minimum, upah mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta konsumsi masyarakat yang selanjutnya mendorong permintaan total dalam perekonomian dan terciptanya peluang kerja; menurut teori perdagangan internasional, ekspor berperan dalam memengaruhi efisiensi ekonomi dan pembukaan lapangan kerja; sementara Penanaman Modal Asing, dalam kerangka teori pembangunan ekonomi, berkontribusi melalui penambahan modal, teknologi, serta penciptaan peluang kerja baru. Adapun Indeks Pembangunan Manusia, dalam perspektif Teori *human capital*, berfungsi meningkatkan produktivitas dan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

Keempat, kebaruan lain terletak pada fokus kontekstual Indonesia. Meskipun banyak penelitian yang menganalisis simultan pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran di Indonesia, secara komprehensif selama lebih dari tiga dekade masih sangat terbatas. Hal ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur ekonomi Indonesia, sekaligus memberi dampak praktis bagi perumus kebijakan dalam menyusun strategi penurunan pengangguran yang berbasis bukti empiris dan teori ekonomi. Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel, periode waktu yang panjang, integrasi teori makroekonomi, dan konteks lokal Indonesia, sehingga ini tidak sekadar menghadirkan temuan empiris, melainkan juga memperluas pemahaman teoretis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini menganalisis secara mendalam pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia pada tahun 1990-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan

analisis yang mampu menangkap hubungan jangka panjang secara simultan, sehingga mampu memperkaya pemahaman secara menyeluruh terkait dinamika pengangguran di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mengatasi permasalahan pengangguran yang bersifat persisten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan mendasar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023. Pertama, berkaitan dengan pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Teori Upah Minimum menjelaskan bahwa tingkat upah tidak sekadar berperan sebagai kompensasi bagi tenaga kerja, melainkan juga mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja dan keputusan produksi perusahaan. Data menunjukkan kenaikan upah minimum yang signifikan terutama saat krisis moneter 1997-1998, namun tidak selalu diikuti dengan penurunan pengangguran yang proporsional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah upah minimum berpengaruh signifikan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023?

Kedua, mengenai peran ekspor Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa negara dengan faktor produksi tenaga kerja melimpah seperti Indonesia, seharusnya memperoleh manfaat dari ekspor produk padat karya dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, stagnasi ekspor pasca tahun 2012 mengindikasikan perlambatan penciptaan lapangan kerja di sektor berorientasi ekspor. Permasalahannya adalah: apakah ekspor berpengaruh signifikan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023?

Ketiga, berkaitan dengan dampak Penanaman Modal Asing (PMA). Teori Investasi Keynes menekankan bahwa investasi berperan krusial dalam mencapai *full employment*. Data menunjukkan tren peningkatan PMA di Indonesia, namun peningkatan ini tidak selalu diikuti penyerapan tenaga kerja yang sepadan karena sebagian besar PMA cenderung padat modal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan dan seberapa besar

pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023?

Keempat, berkaitan dengan dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan. IPM menggambarkan mutu kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang menentukan kemampuan individu untuk terlibat secara produktif di pasar tenaga kerja. Teori *Human Capital* menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia akan memperbesar peluang memperoleh pekerjaan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, meskipun IPM Indonesia terus meningkat, tingkat pengangguran masih tetap tinggi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan kualitas SDM dengan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam variabel makroekonomi yang berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 1990-2023. Pertama, menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan Teori Upah Minimum di Indonesia dengan mengidentifikasi signifikan dan besaran pengaruh upah minimum terhadap pengangguran. Peningkatan upah minimum memiliki dampak memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik, yang selanjutnya mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja baru.

Kedua, menganalisis pengaruh ekspor terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur signifikan dan besaran pengaruh ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah ekspansi perdagangan benar-benar berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja di sektor padat karya sesuai prediksi Teori Heckscher-Ohlin, atau justru memiliki dampak terbatas terhadap pengurangan pengangguran.

Ketiga, menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi dan besaran pengaruh PMA dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Analisis akan mengidentifikasi apakah aliran PMA efektif menurunkan pengangguran melalui *multiplier effect* seperti yang dijelaskan dalam Teori Investasi Keynes, atau justru memiliki dampak minimal karena orientasi investasi yang lebih padat modal. Temuan ini penting untuk mengarahkan kebijakan investasi agar lebih optimal dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Keempat, menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri tingkat signifikan serta besarnya peran IPM dalam menurunkan pengangguran melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia. Analisis akan mengevaluasi apakah peningkatan IPM efektif menurunkan pengangguran atau justru memiliki dampak terbatas akibat ketidakseimbangan antara kualitas tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja produktif. Temuan ini penting untuk merancang kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi dengan strategi penciptaan lapangan kerja agar dapat memberikan dampak optimal terhadap penurunan pengangguran di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait diterimannya pengangguran di Indonesia, dan dapat menjadi informasi dalam pengambilan kebijakan dan penentuan strategi yang tepat.

1.4.2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian ilmiah atau sumber rujukan, sekaligus menjadi pedoman metodologis bagi penelitian mengenai pengangguran di masa mendatang. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan *time series*, peneliti berikutnya dapat mengembangkan analisis dengan memanfaatkan data panel melalui penerapan metode estimasi yang berbeda.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pengangguran

Permasalahan Pengangguran menjadi rintangan utama dalam tahapan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia. Di tingkat nasional, kondisi pengangguran di Indonesia berkembang menjadi isu yang cukup rumit serta sulit diselesaikan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “pengangguran merupakan permasalahan nasional dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, sehingga upaya penanggulangannya harus dilaksanakan secara terintegrasi, menyeluruh, serta menyertakan setiap pihak terkait melalui upaya pengembangan peluang kerja, baik yang berada dalam hubungan kerja formal maupun di luar hubungan kerja formal.

Berdasarkan (BPS) pengangguran didefinisikan sebagai bagian dari kelompok usia produktif yang belum mendapatkan sumber penghasilan, sedang dalam upaya mencari peluang kerja, menjalankan aktivitas pekerjaan kurang dari dua hari dalam seminggu, berupaya memperoleh bidang pekerjaan yang lebih sesuai, atau tengah mempersiapkan usaha mandiri. Berdasarkan ketentuan pemerintah Indonesia, pengangguran merujuk pada masyarakat yang tergolong dalam kelompok tenaga kerja atau sudah berada pada rentang usia produktif (15-65 tahun) tetapi belum bekerja. Meskipun demikian, terdapat kelompok masyarakat yang walaupun sudah masuk umur produktif namun tidak digolongkan sebagai tenaga kerja, seperti pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, serta individu yang menerima pendapatan tetap seperti pensiunan. Ketiga kelompok tersebut tidak dikategorikan

sebagai pengangguran karena tidak berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas ekonomi.

International Labor Organization (ILO) mendefinisikan pengangguran menjadi dua kategori. Pertama, pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, berada dalam kondisi siap bekerja, serta secara aktif mencari pekerjaan. Kedua, setengah penganggur merupakan individu yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pelaku usaha mandiri, namun harus bekerja dengan jam kerja di bawah ketentuan normal dalam periode tertentu, dan masih berusaha mencari pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan. Permasalahan pengangguran dapat muncul akibat berbagai faktor, antara lain terbatasnya ketersediaan lapangan kerja bagi pencari kerja, rendahnya keterampilan yang dimiliki tenaga kerja, minimnya akses terhadap informasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, ketimpangan distribusi kesempatan kerja, belum optimalnya program pemerintah dalam penyediaan pelatihan peningkatan keterampilan, serta adanya budaya kurangnya motivasi pencari kerja yang menyebabkan cenderung cepat putus asa dalam upaya memperoleh kesempatan kerja (Humaira *et al.*, 2022). Dalam buku *Ekonomi Makro* yang ditulis *Case & Fair* (2007), pengangguran diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu:

a. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

pengangguran yang muncul sebagai akibat dari mekanisme alami pasar tenaga kerja disebut sebagai pengangguran friksional. Pengangguran ini bersifat sementara dan berlaku untuk orang yang sedang mencari pekerjaan. Mereka mencari pekerjaan dengan menyesuaikan antara lowongan kerja yang tersedia dengan keahlian yang dimiliki.

b. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran yang timbul akibat adanya pergantian musim atau kegiatan ekonomi yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya sementara waktu. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian.

c. Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*)

Pengangguran yang timbul akibat fluktuasi siklus perekonomian, di mana terdapat periode meningkatnya permintaan agregat dan periode penurunannya. Ketika permintaan agregat melemah, perusahaan umumnya melakukan

pengurangan kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran.

d. Pengangguran Struktural (*Struktural Unemployment*)

Pengangguran struktural merupakan bentuk pengangguran yang terjadi karena adanya pergeseran dalam struktur perekonomian, sehingga sejumlah lapangan kerja pada sektor atau industri tertentu menjadi hilang.

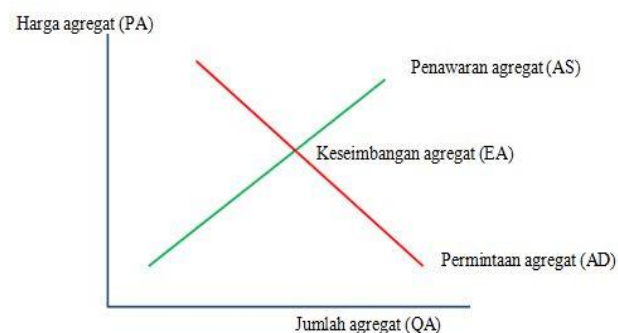
Penelitian (Azzahra *et al.*, 2024) menyatakan bahwa apabila tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan, kondisi tersebut akan berdampak buruk terhadap stabilitas perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat, yang meliputi: dampak negatif terhadap stabilitas perekonomian: pengangguran mengakibatkan tidak tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang seharusnya, karena peningkatan pengangguran menekan pendapatan nasional riil dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengangguran turut menurunkan penerimaan pajak pemerintah akibat berkurangnya aktivitas ekonomi. Ketika pendapatan pajak menurun, kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan aktivitas ekonomi juga ikut melemah. Pengangguran turut melemahkan daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan permintaan barang dan jasa. Kondisi ini membuat pelaku usaha cenderung menunda perluasan produksi maupun penanaman investasi baru, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Dampak negatif terhadap individu dan masyarakat: Pengangguran mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam jangka panjang, pengangguran juga menyebabkan degradasi keterampilan serta produktivitas tenaga kerja. Selain itu, tingginya pengangguran berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik akibat meningkatnya tekanan ekonomi di lingkungan masyarakat.

2.1.1.1 Teori Pengangguran

Menghadapi permasalahan pengangguran, pandangan Teori Keynes justru bertolak belakang dengan Teori Klasik, dimana menurut (Keynes, 1936), pada dasarnya pengangguran timbul akibat lemahnya daya serap publik atas produk barang maupun layanan dalam sebuah tatanan ekonomi. Dengan demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan *output*

yang dihasilkan, melainkan dipicu oleh minimnya angka belanja masyarakat. Keynes menekankan bahwa masalah tersebut tak semestinya dilepaskan sepenuhnya pada sistem persaingan terbuka. Ketika jumlah tenaga kerja bertambah, upah cenderung mengalami penurunan yang justru berdampak negatif, bukan positif, karena turunnya upah akan mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan produsen menurun sehingga perusahaan tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja.

Teori Keynes memandang pasar tenaga kerja sebagai pasar turunan (*derived market*) dari pasar barang. Dalam kerangka ini, kebutuhan akan tenaga kerja tidak bersifat independen, melainkan sepenuhnya bergantung pada tingkat kegiatan *output* perusahaan. Apabila permintaan pasar atas produk melonjak, perusahaan akan memerlukan tenaga kerja ekstra guna meningkatkan kapasitas manufaktur. Sebaliknya, ketika permintaan barang menurun, kuantitas pekerja yang diperkerjakan bakal menyusut.



Sumber: Mankiw, (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*

Gambar 5. Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat

Situasi makroekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh stabilitas antara permintaan serta penawaran secara menyeluruh (Rohman *et al*, 2024). Permintaan agregat yang melebihi penawaran menciptakan "kekurangan produksi" yang mendorong ekspansi *output* dan penyerapan tenaga kerja tambahan. Kondisi sebaliknya, ketika permintaan agregat lebih rendah dari penawaran, menciptakan "kelebihan produksi" yang memaksa perusahaan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja. Kebijakan makroekonomi dalam pandangan Keynes menekankan peran pemerintah dalam mengarahkan permintaan agregat agar berada

sedekat mungkin dengan kondisi “*full employment*”. Dalam kerangka Keynesian, konsep *full employment* tidak hanya dimaknai sebagai situasi ketika seluruh individu yang ingin bekerja telah terserap dalam pasar kerja, tetapi juga menggambarkan tercapainya keseimbangan yang optimal antara sektor perusahaan dengan ruang lingkup ketenagakerjaan (Rohman *et al*, 2024).

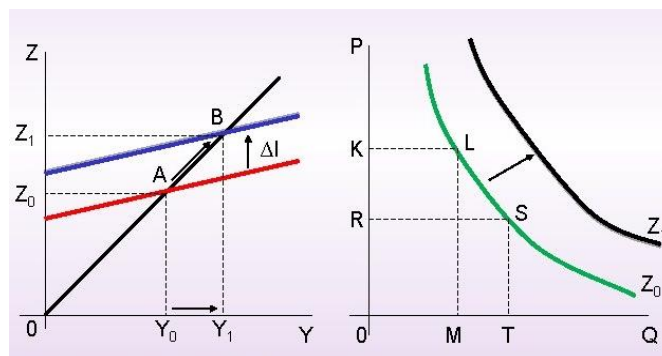
"Permintaan Agregat" merujuk pada total pengeluaran yang dilakukan oleh segenap lapisan publik guna mendistribusikan produk maupun jasa dalam rentang waktu dua belas bulan. Permintaan agregat ($Z = C + I + G$) terdiri dari tiga komponen yang saling mempengaruhi penyerapan tenaga kerja:

- a. Konsumsi rumah tangga (C): Alokasi dana oleh pihak domestik untuk mengakuisisi barang serta layanan konsumtif, yang secara langsung membentuk permintaan terhadap *output* domestik.
- b. Investasi perusahaan (I): Biaya bagi perluasan fasilitas manufaktur yang menciptakan efek pengganda dalam penciptaan lapangan kerja.
- c. Pengeluaran pemerintah (G): Belanja negara untuk infrastruktur dan layanan publik yang menstimulasi aktivitas ekonomi.

Pemerintah memiliki peran dalam memengaruhi permintaan kolektif, baik secara simultan melalui belanja publik maupun lewat jalur tidak langsung lewat pengaruhnya terhadap konsumsi dan investasi. Setiap komponen permintaan agregat diatur oleh beragam elemen yang bervariasi. Pengeluaran konsumsi bergantung pada tingkat perolehan laba yang didapat oleh keluarga serta kecenderungan mereka untuk membelanjakan pendapatannya (*propensity to consume*) (Permata *et al.*, 2024). Sementara itu, pengeluaran investasi ditentukan oleh besaran profitabilitas yang diantisipasi (*marginal efficiency of capital*) dan biaya perolehan modal yang diindikasikan oleh angka bunga. Adapun pengeluaran pemerintah diputuskan melalui mekanisme politik yang rumit serta dalam konteks makroekonomi diperlakukan sebagai variabel yang bersifat eksogen.

Karakteristik utama teori Keynes terletak pada adanya keterkaitan serta hubungan timbal balik di antara tiga pasar makro, yakni pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Konsep interdependensi tersebut menjelaskan bahwa instabilitas yang muncul di satu sektor akan berdampak pada situasi pasar lainnya melalui

mekanisme transmisi yang bersifat kompleks. Misalnya, ketidakseimbangan pada pasar uang yang memicu lonjakan angka suku bunga bakal memengaruhi keputusan penanaman modal di sektor riil, yang kemudian berdampak yang kemudian berdampak pada permintaan tenaga kerja. Suatu perekonomian dikatakan berada dalam kondisi keseimbangan umum (*general equilibrium*) apabila seluruh pasar berada pada titik keseimbangan secara bersamaan atau simultan (Permata *et al.*, 2024).



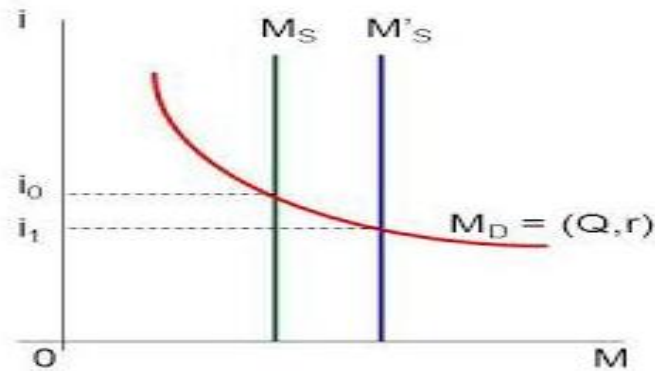
Sumber: Blanchard & Johnson, (2017). Makroekonomi

Gambar 6. Keseimbangan Pasar Barang

Gambar menunjukkan mekanisme keseimbangan pasar barang dalam kerangka teori Keynes, dengan garis tegak lurus mewakili parameter nilai (P) serta garis mendatar menggambarkan tingkat *output* maupun perolehan devisa (Y) (Kardono, 2004). Kurva Z merepresentasikan permintaan agregat yang tersusun atas konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ($C+I+G$), sedangkan garis diagonal 45° menggambarkan keadaan keseimbangan ketika penawaran agregat sebanding dengan permintaan agregat. Titik potong antara kurva Z dengan garis keseimbangan menentukan tingkat *output* ekuilibrium yang secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian.

Ketika terjadi peningkatan investasi (ΔI) yang menggeser kurva permintaan agregat dari Z_0 ke Z_1 , maka tingkat *output* akan meningkat dari titik K ke titik L , yang selanjutnya mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Proses ini berlangsung karena kenaikan permintaan agregat menuntut peningkatan *output* guna memenuhi kebutuhan pasar, dan peningkatan *output* tersebut hanya

dapat dicapai melalui penambahan penggunaan tenaga kerja. Sebaliknya melemahnya permintaan agregat akan memicu penurunan *output* dan kenaikan tingkat pengangguran, mengingat sektor ketenagakerjaan ialah bursa derivatif yang sangat bergantung pada situasi perdagangan barang (Rohman *et al*, 2024).



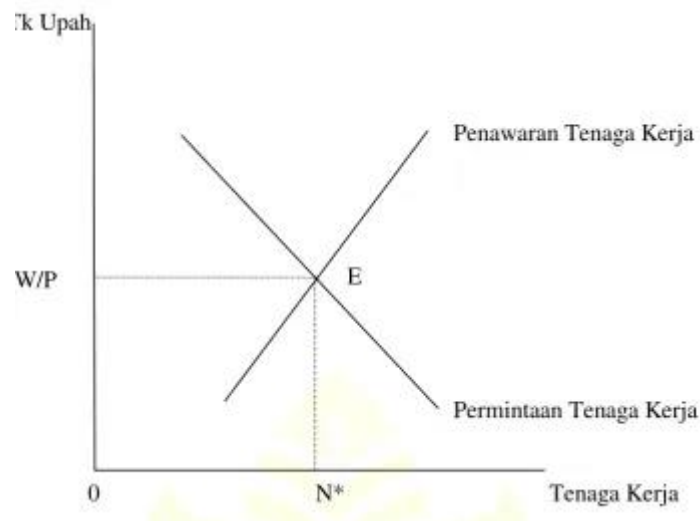
Sumber: Blanchard & Johnson, (2017). *Makroekonomi*

Gambar 7. Keseimbangan Pasar Uang

Gambar diatas mengilustrasikan keseimbangan pasar uang dalam kerangka teoritis Keynes, di mana garis vertikal mempresentasikan rasio bunga (r) serta garis horizontal mengindikasikan volume moneter (M). Kurva permintaan uang yang mempunyai gradien negatif menunjukkan relasi asimetris antara nilai bunga dengan permohonan likuiditas, yaitu ketika suku bunga meningkat, masyarakat bakal membatasi simpanan tunai demi pemanfaatan spekulatif dan cenderung mengalokasikan aset mereka ke dalam instrumen obligasi (Sirait *et al.*, 2023). Kondisi ini terjadi karena *opportunity cost* memegang uang tunai menjadi lebih tinggi ketika tingkat bunga naik.

Kondisi ekuilibrium di sektor moneter tercapai saat volume alat tukar yang beredar, yang bersifat eksogen karena ditetapkan melalui kebijakan moneter, bertemu dengan kurva permintaan uang pada suatu skala suku bunga tertentu. Suku bunga keseimbangan tersebut berpengaruh langsung terhadap keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan, di mana biaya pinjaman yang lebih murah bakal menstimulasi eskalasi penanaman modal lantaran beban kapital yang kian terjangkau. Peningkatan investasi ini kemudian memicu perluasan kapasitas produksi dan pembukaan kesempatan kerja yang lebih besar, sehingga pada

akhirnya mampu menekan tingkat pengangguran. Proses transmisi moneter ini menggambarkan peran kebijakan bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar yang selanjutnya berdampak pada pasar tenaga kerja melalui mekanisme suku bunga dan investasi (Sudirman *et al.*, 2014).



Sumber: Case & Fair, (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*

Gambar 8. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

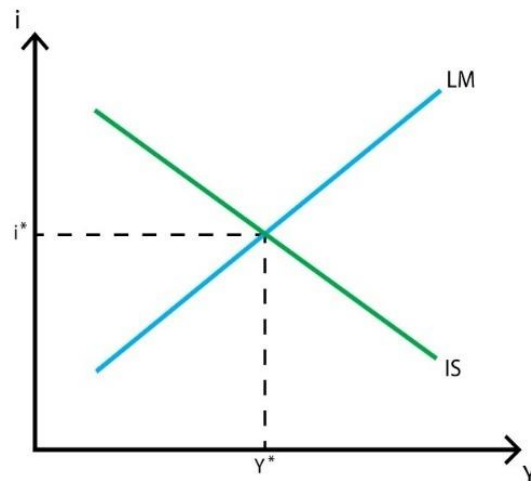
Gambar 8 menjelaskan pergerakan sektor ketenagakerjaan dalam sudut pandang Keynesian. Garis tegak lurus mengindikasikan rasio upah riil (K) dan garis mendatar memperlihatkan tenaga kerja (N). Grafik penawaran yang memiliki pola menanjak merefleksikan korelasi linear di antara besaran upah dengan kuantitas individu yang mau bekerja, sebab kian tinggi kompensasi riil yang diberikan maka kian masif jumlah populasi yang berniat untuk masuk ke pasar kerja.

Grafik kebutuhan pekerja yang menurun mempresentasikan korelasi berkebalikan antara rasio upah dengan total buruh yang dikerjakan perusahaan menurut tingkat efisiensi produktivitas sumber daya manusia. Ekuilibrium pada sektor tenaga kerja tercapai pada titik temu kedua kurva yang menetapkan posisi *employment equilibrium*. Akan tetapi, Keynes menekankan bahwa stabilitas ini tidak selalu berada pada kondisi *full employment* sehingga terdapat potensi pengangguran *involunter*. Konsep ini menjelaskan bahwa sekalipun pasar kerja dalam keadaan stabil, defisit lapangan kerja tetap bisa muncul lantaran besaran permintaan kolektif

di sektor perusahaan kurang memadai untuk mengakomodasi seluruh potensi pekerja yang ada.

Ketika terjadi penurunan permintaan agregat di pasar barang, grafik kebutuhan pekerja bakal berpindah ke arah kiri akibat perusahaan membatasi volume produksi dan membutuhkan lebih sedikit pekerja, sehingga tingkat *employment* turun dan pengangguran meningkat meskipun tingkat upah mungkin tidak mengalami penyesuaian yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja merupakan pasar turunan yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi di pasar barang, di mana ketidakseimbangan permintaan agregat akan langsung memberikan efek terhadap rekrutmen buruh serta angka pengangguran dalam perekonomian (Barus *et al.*, 2025). Ketergantungan pasar tenaga kerja terhadap pasar barang inilah yang menjadi dasar argumen Keynes bahwa kebijakan untuk mengatasi pengangguran harus fokus pada rangsangan terhadap permintaan kolektif lewat instrumen fiskal serta moneter yang ekspansif.

Ada cara lain untuk menjelaskan proses keseimbangan pasar dalam teori Keynes yaitu melalui skema IS-LM dengan memperlihatkan bahwa tingkat *employment* dalam perekonomian ditentukan oleh interaksi di tengah rasio bunga serta perolehan domestik yang tercermin melalui titik potong grafik IS dan LM. Garis IS merepresentasikan paduan antara nilai bunga dan pendapatan negara di mana investasi sama dengan tabungan, sementara garis LM memaparkan integrasi suku bunga serta penghasilan nasional saat permintaan terhadap uang identik dengan ketersediaan uang.



Sumber: Blanchard & Johnson, (2017). *Makroekonomi*

Gambar 9. Kurva IS-LM

Pergeseran garis IS ke sisi kanan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi swasta akan meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran, meskipun disertai dengan kenaikan tingkat bunga. (Priyanto *et al.*, 2024) mekanisme ini terjadi karena bertambahnya pengeluaran pemerintah atau investasi bakal memacu permintaan kolektif di permintaan perusahaan, yang selanjutnya menstimulasi peningkatan *output* dan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, strategi moneter ekspansif yang mendorong grafik LM ke sisi kanan sanggup mereduksi angka bunga serta menstimulasi penanaman modal, sehingga meningkatkan hasil produksi dan *employment* melalui dorongan aktivitas investasi perusahaan.

Model IS-LM juga menjelaskan kondisi khusus seperti *liquidity trap* dimana kebijakan moneter menjadi tidak efektif dalam mengatasi pengangguran, sehingga kebijakan fiskal menjadi instrumen yang lebih tepat untuk meningkatkan tingkat *employment* dalam perekonomian. Dalam kondisi *liquidity trap*, kurva LM menjadi horizontal pada tingkat bunga yang sangat rendah, sehingga ekspansi jumlah uang beredar tidak bakal menurunkan biaya pinjaman lebih jauh serta tidak akan memicu investasi. Dalam situasi ini, hanya strategi fiskal ekspansif yang sanggup menggeser grafik IS dan meningkatkan tingkat *employment* (Priyanto *et al.*, 2024).

(Safriadi *et al.*, 2014) menjelaskan bahwa model ekonom John Hicks (1937) berhasil mengintegrasikan teori Keynes ke dalam *framework* matematika yang lebih *rigorous*, dimana keseimbangan simultan di pasar barang (kurva IS) dan pasar uang (kurva LM) menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat *employment* dalam perekonomian. Kontribusi penelitian ini dalam menganalisis efektifitas kebijakan makroekonomi menggunakan model IS-LM untuk konteks Indonesia menunjukkan bahwa *framework* Hicks tetap relevan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap pengangguran di negara berkembang (Priyanto *et al.*, 2024).

Jumlah tenaga kerja perkembangan pengangguran suatu negara dapat diketahui dengan menghitung tingkat pengangguran. Besarnya angka pengangguran mengindikasikan banyaknya penduduk yang termasuk usia produktif tetapi belum memiliki pekerjaan. Persentase pengangguran diproyeksikan melalui perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase. Sebagaimana formula berikut:

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dimana:

- Jumlah Pengangguran = Individu yang menganggur dan berupaya mendapatkan pekerjaan
- Jumlah Angkatan Kerja = Penduduk Bekerja + Pengangguran

Teori ini didukung dengan hasil salah satu penelitian empiris yang relevan adalah artikel “Menganalisis Teori Keynesian dalam Meminimalisir Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia” (Prasetyo & Cahyani, 2022), Penelitian ini menggunakan kerangka dasar teori Keynes, terutama gagasan bahwasanya peningkatan belanja publik mampu menstimulasi ekspansi ekonomi, yang kemudian menghasilkan penurunan tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap efektivitas pengeluaran publik yang tidak berlandaskan pada preparasi logis sesuai instruksi dalam skema Keynesian. Selain

itu, teori ini juga sejalan dengan kesimpulan penelitian (Yien *et al.*, 2019) menemukan bahwa meskipun teori Keynes mengedepankan efektivitas kebijakan *fiscal* seperti pengeluaran *public* untuk mengatasi pengangguran melalui stimulasi permintaan agregat, dalam konteks Indonesia, justru kebijakan moneter terbukti memiliki pengaruh lebih kuat terhadap peningkatan finansial. Secara jangka pendek maupun panjang, variabel moneter seperti suplai uang terbukti lebih efektif mendorong pertumbuhan dibanding kebijakan fiskal, dan terdapat hubungan kausal dua arah antara suku bunga serta pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, sekaligus menunjukkan bahwa intervensi pemerintah (*core Keynesian policy*) tetap relevan, meski mekanismenya perlu disesuaikan dengan struktur ekonomi nasional.

2.1.2 Upah Minimum

Standar upah minimum merupakan bentuk intervensi otoritas publik pada pasar tenaga kerja yang berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan ambang bawah kompensasi bagi pekerja di wilayah atau bidang industri tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum diartikan sebagai nilai gaji bulanan terendah yang diformulasikan oleh pemerintah guna menjamin terpenuhinya hak karyawan dalam memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Implementasi kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang sejalan dengan perspektif Keynesian yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja.

Pada konteks Indonesia, kebijakan upah minimum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) yang harus diputuskan secara tahunan oleh gubernur, serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang penetapannya dapat dilakukan oleh kepala daerah dengan persyaratan tertentu. Penetapan besaran upah ini menyesuaikan dengan situasi finansial serta aspek ketenagakerjaan yang mengacu pada kesamaan daya beli masyarakat, angka penyerapan tenaga kerja, serta nilai tengah upah. Semenjak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021, kalkulasi kenaikan gaji minimum menggunakan metode yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi

atau inflasi daerah. Metode tersebut diterapkan agar penetapan upah minimum lebih objektif, transparan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi daerah.

Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun dan dikukuhkan pada kisaran angka tertentu yang berada di antara nilai tertinggi serta nilai terendah upah minimum di daerah tersebut. Informasi yang dipakai dalam tahapan kalkulasi ini bersumber dari instansi statistik resmi guna menjaga ketelitian dan keaslian data analisis. Pihak pemberi kerja dilarang memberikan gaji di bawah standar upah minimum yang telah disahkan, dan pelanggaran atas aturan tersebut bakal dijatuhi hukuman administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi entitas bisnis skala mikro dan kecil yang telah mencapai kualifikasi tertentu, di mana mereka diberikan kelonggaran dari aturan upah minimum dengan tetap harus memperhatikan pertimbangan faktor-faktor tertentu dalam penentuan besaran upah (Al'anam & Armadani, 2025).

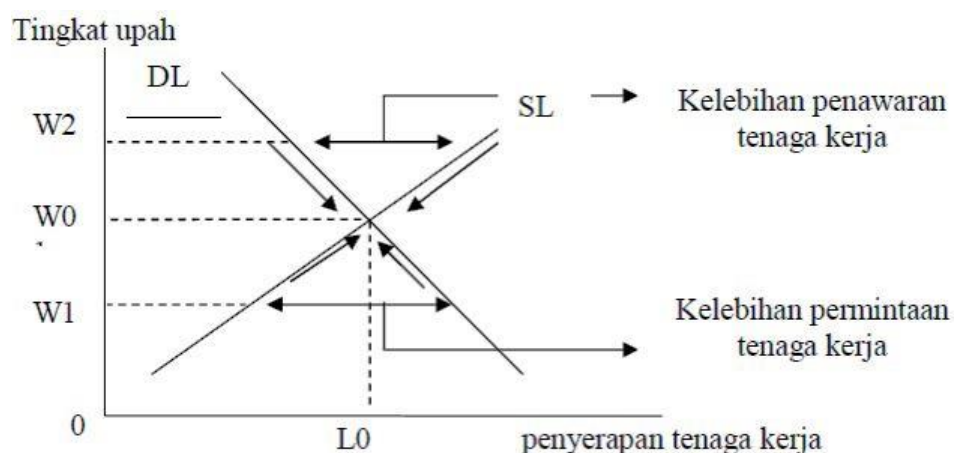
Pengaruh kebijakan gaji minimum terhadap sektor ketenagakerjaan memiliki karakteristik yang bersifat multidimensi serta sangat bergantung pada beragam kondisi ekonomi makro. Kenaikan upah minimum dapat memberikan efek positif melalui peningkatan produktivitas pekerja karena motivasi yang lebih baik, berkurangnya tingkat pergantian karyawan, dan meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi domestik (Saputri & Sitorus, 2025). Di sisi lain, apabila peningkatan upah tersebut tidak diikuti dengan perbaikan produktivitas, pihak pengusaha berpotensi memangkas total karyawan atau melakukan transisi ke penggunaan sistem produksi yang lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, implikasi dari penerapan upah minimum amat ditentukan oleh profil industri, tatanan perekonomian daerah, kemampuan perusahaan dalam menyerap kenaikan biaya, serta fenomena perbedaan karakteristik pasar tenaga kerja antara bidang formal dan informal yang perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengupahan (Marliana, 2022).

2.1.2.1 Teori Upah Minimum

Upah Minimum menjelaskan mekanisme penetapan batas minimum kompensasi yang wajib dibayarkan kepada pekerja serta dampaknya terhadap keseimbangan

pasar tenaga kerja. Berbeda dengan konsep upah yang dihasilkan sepenuhnya melalui proses tawar-menawar antara penyedia dan pencari kerja di pasar, ketentuan upah minimum ialah wujud keterlibatan otoritas publik guna menjaga taraf hidup buruh dari pembayaran yang sangat minim (Asmara *et al.*, 2024). Aturan tersebut berperan sebagai alat krusial untuk menjamin agar seluruh tenaga kerja memperoleh balasan jasa yang memadai demi mencukupi standar keperluan harian.

Upah minimum memiliki dua fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, sebagai jaring pengaman sosial yang menjamin standar hidup minimum bagi pekerja. Kedua, sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja melalui mekanisme permintaan agregat. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan pasar, terjadi perubahan perilaku baik dari sisi pekerja maupun pengusaha yang menciptakan dampak berantai dalam sistem perekonomian.



Sumber: Mankiw, (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*

Gambar 10. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran

Gambar di atas menggambarkan keseimbangan pasar tenaga kerja dengan adanya penetapan upah minimum (Atiyatna *et al.*, 2019). Kurva permintaan tenaga kerja (DL) yang menurun menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat upah, maka kuantitas pekerja yang dibutuhkan perusahaan akan berkurang akibat beban operasional yang kian berat. Sebaliknya, kurva penawaran tenaga kerja (SL) yang menaik mencerminkan bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin banyak individu yang bersedia memasuki pasar kerja. Titik keseimbangan pasar

terjadi pada pertemuan kedua kurva ini pada tingkat upah W_0 dengan jumlah tenaga kerja L_0 . Namun, ketika pemerintah menetapkan upah minimum pada tingkat W_2 yang berada di atas upah keseimbangan pasar W_0 , terjadi ketidakseimbangan struktural. Pada tingkat upah W_2 , jumlah pekerja yang bersedia bekerja meningkat karena upah yang lebih menarik, sementara permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja menurun karena biaya produksi yang lebih tinggi.

Pengaruh upah minimum terhadap pasar tenaga kerja sangat bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila permintaan tenaga kerja bersifat elastis, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja yang signifikan karena perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan biaya. Sebaliknya, pada industri dengan permintaan tenaga kerja yang inelastis, dampak pengurangan penyerapan pekerja akan lebih terbatas karena perusahaan memiliki ketergantungan tinggi terhadap input tenaga kerja yang tidak mudah digantikan dengan mesin atau teknologi (Lestari & Nilasari, 2025). Teori ini juga mengakui adanya efek skala produksi (*scale effect*) dan efek substitusi (*substitution effect*). Efek skala produksi terjadi ketika kenaikan upah minimum meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang naik dan permintaan konsumen menurun, yang memaksa perusahaan mengurangi volume produksi dan jumlah tenaga kerja. Sementara itu, efek substitusi muncul ketika perusahaan merespons kenaikan upah dengan mengganti tenaga kerja dengan mesin atau teknologi otomatisasi yang lebih efisien dalam jangka panjang (Ummah & Yasin, 2021).

Teori Upah Minimum juga menekankan pentingnya mekanisme penetapan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan produktivitas dapat menimbulkan distorsi pasar yang kontraproduktif, sementara penetapan yang terlalu rendah gagal memberikan perlindungan memadai bagi pekerja (Adinda & Akbar, 2024). Oleh karena itu, kebijakan upah minimum yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, tingkat produktivitas tenaga kerja, struktur industri, serta kemampuan daya serap perusahaan terhadap kenaikan biaya. Dalam konteks Indonesia, formulasi kebijakan upah minimum melalui pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan

ekonomi mencerminkan upaya mencapai keseimbangan tersebut agar kebijakan dapat melindungi kesejahteraan pekerja tanpa menghambat penciptaan lapangan kerja dan daya saing industri nasional.

2.1.3 Ekspor

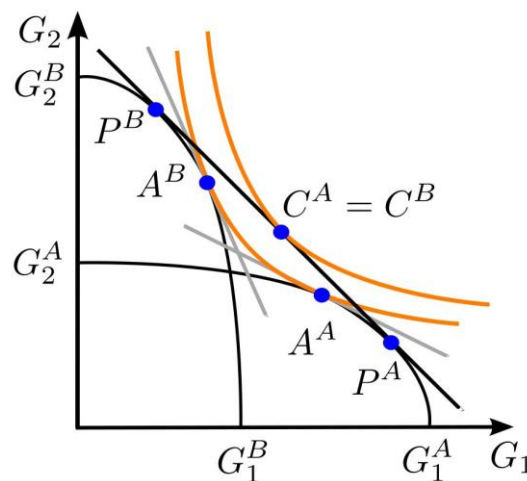
Ekspor merupakan aktivitas pertukaran barang maupun jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berdomisili di negara yang berlainan. Aktivitas ekspor dan impor tersebut menjadi ciri dari perekonomian terbuka (*open economy*) (Ngatikoh & Faqih, 2020). Semakin besar rasio ekspor terhadap pendapatan nasional, maka semakin tinggi tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara (Putra *et al.*, 2022). Perdagangan internasional atau pada ekspor dipicu oleh beberapa faktor fundamental berikut.

1. Perbedaan hasil produksi tiap-tiap negara mempunyai kekayaan alam, modal, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Ada negara yang dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang melimpah, sementara ada negara yang kekurangan hasil produksi barang atau jasa tersebut tetapi memiliki barang atau jasa lainnya. Contoh Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian, Korea dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik.
2. Perbedaan Harga Barang. Harga suatu barang di tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya, harga komputer di Korea Selatan dan di Jepang lebih murah daripada harga di Indonesia mendorong orang Indonesia membeli komputer tersebut di Korea atau Jepang untuk dijual di Indonesia. Mereka melakukan perdagangan karena memperoleh keuntungan sebagai akibat dari adanya perbedaan harga jual dan harga beli.
3. Adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beranekaragam. Namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja kemudian melakukan perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini produktivitas tiap negara menjadi lebih tinggi.

Ekspor memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui mekanisme yang mendorong perluasan produksi. Ketika permintaan ekspor meningkat, perusahaan akan memperluas kapasitas produksinya dan memerlukan tambahan sumber daya manusia yang lebih besar guna merealisasikan pesanan dari pasar internasional. Fenomena ini menstimulasi terbentuknya peluang okupasi baru yang mencakup ranah operasional manufaktur primer, hingga merambah ke berbagai lini pendukung seperti transportasi, pergudangan, dan jasa pengiriman. Dampak perdagangan terhadap penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada jenis produk yang diperdagangkan, dimana produk padat karya seperti tekstil dan garmen memiliki probabilitas untuk mengakomodasi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan entitas bisnis padat modal seperti pertambangan yang lebih mengandalkan mesin dan teknologi.

2.1.3.1 Teori Heckscher-Ohlin (HO)

Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa perbedaan faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, menjadi dasar terbentuknya perdagangan internasional (Jeyarajah, 2024). Setiap negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan relatif murah, serta mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka dan mahal (Bakara *et al.*, 2024). Dalam model ini, perdagangan terjadi karena adanya perbedaan kelimpahan faktor produksi antarnegara. Jika suatu negara memiliki tenaga kerja yang melimpah, maka biaya tenaga kerja di negara tersebut akan relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya modal. Akibatnya, negara tersebut akan cenderung mengekspor barang-barang yang produksinya banyak menggunakan tenaga kerja (*labor-intensive*), seperti tekstil atau produk pertanian. Sebaliknya, negara yang kaya akan modal akan mengekspor barang-barang yang produksinya memerlukan banyak modal (*capital-intensive*), seperti mesin atau teknologi tinggi. Melalui spesialisasi ini, setiap negara dapat memproduksi barang secara lebih efisien dan kemudian saling bertukar, sehingga kedua negara memperoleh keuntungan dari perdagangan. (Sari *et al.*, 2015).



Sumber: (Heckscher & Ohlin, 1933; Wikipedia, 2025)

Gambar 11. Model Teori Heckscher Ohlin

Model di atas menggambarkan kurva kemungkinan produksi (*Production Possibility Frontier*) dari dua negara yang berbeda dalam kelimpahan faktor produksi. Negara A yang kaya akan tenaga kerja memiliki keunggulan dalam memproduksi barang padat karya (tekstil), sementara Negara B yang kaya akan modal unggul dalam produksi barang padat modal (baja). Titik spesialisasi dan perdagangan menunjukkan bahwa ketika kedua negara berfokus pada produksi sesuai keunggulan masing-masing, total produksi meningkat dan tingkat kesejahteraan kedua negara membaik. Dalam konteks penelitian ini, model tersebut menjelaskan bahwa apabila Indonesia sebagai negara dengan tenaga kerja melimpah mampu mengoptimalkan ekspor produk padat karya, maka permintaan tenaga kerja akan meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Mekanisme ekspor juga mempengaruhi penyesuaian upah dan harga faktor produksi antarnegara yang melakukan perdagangan. Ketika Indonesia mengekspor produk padat karya ke negara lain, permintaan terhadap tenaga kerja di pasar domestik akan mengalami peningkatan yang berimplikasi pada tren kenaikan upah tenaga kerja. Sebaliknya, ketika Indonesia mengimpor barang padat modal, permintaan terhadap modal di dalam negeri menurun sehingga *return* modal bisa tertekan. Proses penyesuaian ini pada akhirnya akan mengarah pada keseimbangan baru dimana upah dan harga faktor produksi antarnegara yang berdagang akan

semakin mendekati satu sama lain. Dalam konteks pengangguran, mekanisme ini penting karena peningkatan upah akibat ekspor padat karya akan meningkatkan partisipasi individu untuk bergabung dalam angkatan kerja serta memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengakomodasi lebih banyak tenaga kerja selama permintaan ekspor terus meningkat.

Ekspor dapat mengurangi pengangguran melalui spesialisasi produksi. Negara yang fokus memproduksi barang sesuai keunggulan faktor produksinya akan lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Indonesia dengan keunggulan tenaga kerja seharusnya mengembangkan industri manufaktur ringan, pertanian olahan, dan jasa yang banyak menyerap pekerja. Namun, kenyataannya banyak negara berkembang termasuk Indonesia justru mengekspor bahan mentah atau komoditas primer yang minim penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan potensi penciptaan lapangan kerja dari ekspor tidak optimal. Kebijakan hilirisasi dan pengembangan industri padat karya menjadi kunci agar perdagangan ekspor benar-benar dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan di Indonesia.

Asumsi dalam teori ini juga menyatakan bahwa faktor produksi tidak dapat berpindah antarnegara, tetapi dapat bergerak bebas di dalam negara. Hal ini penting untuk memahami dampak perdagangan terhadap pengangguran di berbagai wilayah Indonesia. Ketika ekspor meningkat di sektor tertentu, tenaga kerja dari sektor atau daerah lain seharusnya bisa berpindah untuk mengisi kebutuhan tersebut. Namun, dalam praktiknya mobilitas tenaga kerja di Indonesia masih terbatas karena perbedaan keterampilan, biaya migrasi, dan hambatan informasi pasar kerja. Akibatnya, peningkatan ekspor pada satu lingkup wilayah tidak selalu mampu menurunkan angka pengangguran di area administratif lainnya. Dinamika ini menjelaskan mengapa meskipun ekspor nasional meningkat, tingkat pengangguran di beberapa daerah masih tetap tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti pelatihan keterampilan, subsidi migrasi, dan sistem informasi pasar kerja yang lebih baik agar manfaat dari perdagangan global dapat terdistribusi secara lebih ekuivalen di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu (Amrulloh, 2023) yang memberikan penjelasan bahwa perdagangan memberikan dampak yang signifikan

terhadap fluktuasi angka pengangguran di lingkup regional ASEAN. Negara dengan faktor produksi tenaga kerja berlimpah, seperti Indonesia, mengalami penurunan pengangguran seiring meningkatnya ekspor sektor padat karya. Hasil ini memperkuat pandangan Teori Heckscher-Ohlin bahwa dampak Ekspor terhadap pasar tenaga kerja sangat bergantung pada keunggulan faktor produksi (tenaga kerja) dan kesiapan struktural suatu negara. Dengan demikian, Teori Heckscher-Ohlin memberikan landasan teoretis bahwa dalam jangka panjang, Ekspor dapat menurunkan pengangguran melalui pertumbuhan sektor padat karya. Namun, dalam jangka pendek, penyesuaian antar sektor dapat menimbulkan transisi tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran sementara sebelum ekonomi mencapai keseimbangan baru.

2.1.4 Penanaman Modal Asing

Pembangunan ekonomi negara membutuhkan tambahan sumber daya keuangan untuk menjaga laju perkembangan ekonominya, agar tidak ketinggalan dari negara lain. Salah satu metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui investasi. (Puspita *et al.*, 2024) merumuskan investasi sebagai tindakan mengorbankan aset saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau aset yang lebih besar di masa depan. Investasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama:

1. **Investasi Riil:** Investasi riil melibatkan penempatan sumber daya pada aset fisik yang dipergunakan dalam pembuatan barang atau jasa. Hal ini mencakup investasi dalam berbagai jenis aset nyata seperti properti, peralatan, dan bahkan peningkatan dalam aset kognitif yang diaplikasikan dalam skema produksi. Penanaman modal riil tersebut secara langsung memberikan dampak terhadap *output* komoditas atau jasa.
2. **Investasi Keuangan:** melibatkan akuisisi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dalam bentuk surat berharga. Investasi finansial umumnya terjadi di sektor perbankan dan pasar modal, di mana asetnya dapat diperdagangkan dengan mudah dan cepat di pasar keuangan yang terstruktur.

Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa investasi riil terkait dengan aset fisik yang digunakan dalam produksi, sementara investasi keuangan lebih berfokus

pada instrumen keuangan yang memiliki nilai finansial. Keduanya memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dalam konteks ekonomi dan keuangan. Investasi dalam *Financial Investment* dapat melalui dua cara:

- a. Investasi Langsung (*Direct Investment*): Merupakan skema penanaman modal di mana investor melakukan membeli atau memiliki aset keuangan secara langsung. Pemodal langsung memiliki kontrol dan kepemilikan langsung atas aset tersebut.
- b. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*): Investasi ini melibatkan pembelian surat berharga yang mewakili kepemilikan dalam perusahaan atau portofolio aset keuangan. Sebagai contoh, investasi dalam Reksadana (*Mutual Fund*) adalah bentuk investasi tidak langsung. Pemodal tidak memiliki aset langsung tetapi memiliki kepemilikan dalam portofolio yang dikelola oleh perusahaan investasi.

Investasi dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan negara berkembang cenderung menarik investasi asing dengan tujuan meningkatkan modal yang tersedia untuk pembangunan ekonomi mereka. Investasi dari luar negeri dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*): Ini merujuk pada investasi yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan atau badan usaha dari luar negeri. Pemodal asing memiliki kontrol langsung terhadap bisnis atau aset yang mereka investasikan.
- b. Investasi Portofolio Luar Negeri (*Foreign Portfolio Investment*): Investasi ini didanai oleh pihak asing namun dijalankan oleh penduduk dalam negeri. Pemilik asing memiliki kepemilikan dalam berbagai aset keuangan yang dikelola oleh badan usaha lokal.

2.1.4.1 Teori Investasi Keynes

Teori investasi Keynes (1936) menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan investasi tidak semata-mata didorong oleh kemampuan finansial, tetapi juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *marginal efficiency of capital* dan *animal spirits*. *Marginal efficiency of capital* menggambarkan tingkat keuntungan yang

diharapkan dari suatu investasi, sedangkan *animal spirits* merepresentasikan unsur psikologis, ekspektasi, serta kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, keputusan investasi bersifat fluktuatif dan tidak sepenuhnya rasional karena sangat dipengaruhi oleh sentimen serta persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara.

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks teori Keynes, menegaskan bahwa arus investasi asing tidak hanya bergantung pada potensi keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada stabilitas politik, ketersediaan infrastruktur, serta efisiensi birokrasi negara penerima investasi. Ketika kondisi ekonomi dan politik suatu negara dianggap kondusif, maka ekspektasi keuntungan meningkat dan mendorong peningkatan aliran modal asing. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi global atau instabilitas domestik dapat menurunkan *animal spirits investor*, sehingga menunda atau mengurangi rencana investasi yang berpotensi menggerakkan perekonomian (Tanaya & Suyanto, 2023).

Masuknya investasi asing memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesempatan kerja melalui efek pengganda (*multiplier effect*). Pembangunan fasilitas produksi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur maupun jasa. Sementara itu, dampak tidak langsung tampak melalui meningkatnya permintaan terhadap bahan baku, jasa transportasi, serta sektor pendukung lainnya. Kondisi ini pada tingkatan selanjutnya akan menstimulasi peningkatan perolehan upah individu serta mengokohkan intensitas penyerapan produk oleh rumah tangga (Wiganepdo & Soegoto, 2022). Dengan demikian, PMA dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat pengangguran apabila terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal.

Teori Keynes juga menyoroti bahwa pengaruh investasi terhadap pengangguran tidak selalu bersifat positif dalam jangka pendek. Arus masuk PMA kerap kali disertai dengan introduksi teknologi mutakhir serta penerapan manajemen operasional yang efisien, di mana hal tersebut berpotensi menggeser peran tenaga kerja manusia pada industri tertentu. Hal ini menimbulkan dampak penyesuaian struktural di mana sebagian sektor tradisional kehilangan daya saing dan terpaksa

melakukan pengurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Keynes bahwa penyesuaian ekonomi terhadap investasi baru membutuhkan waktu, terutama ketika keterampilan tenaga kerja belum sejalan dengan kebutuhan teknologi baru (Risqy, 2024).

Dampak positif PMA dalam jangka panjang terhadap tenaga kerja mulai terlihat setelah proses adaptasi ekonomi selesai. Tenaga kerja lokal yang berhasil bertransformasi dan menguasai keterampilan baru akan meningkatkan produktivitas nasional. PMA yang bersifat padat karya serta terintegrasi dengan rantai pasok domestik akan memberikan efek pengganda dengan signifikansi yang lebih luas terhadap stimulasi rekrutmen tenaga kerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan PMA dalam menurunkan pengangguran sangat ditentukan oleh kapasitas ekonomi domestik untuk menyerap teknologi dan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi.

Teori investasi Keynes memberikan dasar teoritis yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antara PMA dan tingkat pengangguran di Indonesia. Fluktuasi arus investasi asing dapat dijelaskan melalui konsep *animal spirits*, sementara efek pengganda menjelaskan bagaimana investasi menjadi katalisator akselerasi ekonomi serta intensitas labor secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan PMA perlu diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat sumber daya manusia, memperluas keterlibatan industri lokal, serta menciptakan iklim ekonomi yang stabil agar manfaat jangka panjangnya terhadap pengurangan pengangguran dapat tercapai secara optimal.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator gabungan yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan manusia pada sebuah negara melalui tiga pilar utama, yaitu: faktor kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (estimasi masa studi serta rata-rata waktu sekolah), dan tingkat kesejahteraan yang diukur melalui pendapatan per kapita (BPS, 2025). Indeks Pembangunan Manusia ini disusun untuk mengevaluasi hasil pembangunan pada aspek kemanusiaan, bukan hanya terbatas pada indikator pertumbuhan ekonomi saja. IPM memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas sumber daya manusia karena

mengintegrasikan aspek kesehatan fisik, kapasitas intelektual, dan daya beli masyarakat dalam satu indikator (UNDP, 2024). Dalam konteks ketenagakerjaan, IPM menjadi indikator penting karena mencerminkan standar kualitas sumber daya manusia yang tersedia di pasar tenaga kerja.

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi mempengaruhi kemampuan tenaga kerja untuk bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan produktivitas yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan pekerja dengan kemampuan teknis dan analitis yang mumpuni, sementara kesehatan yang baik memastikan mereka dapat bekerja secara konsisten dengan performa maksimal. Sebaliknya, rendahnya IPM mencerminkan keterbatasan kualitas tenaga kerja yang dapat menyebabkan pengangguran yang disebabkan oleh faktor keahlian, yaitu adanya ketidakcocokan antara kemampuan pekerja dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan (Dwi & Aisyah, 2023).

Peningkatan IPM tidak selalu memberikan efek langsung terhadap berkurangnya jumlah pengangguran. Qamariyah *et al.* (2022), apabila perbaikan kualitas pekerja tidak disertai dengan ekspansi peluang kerja yang mencukupi, maka dapat timbul fenomena pengangguran terdidik. Situasi ini muncul saat sejumlah besar individu dengan tingkat pendidikan tinggi sulit terserap oleh dunia kerja disebabkan terbatasnya posisi pekerjaan yang selaras dengan kualifikasi mereka. Secara eksplisit, IPM yang tinggi memang membentuk tenaga kerja yang bermutu, namun tanpa adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru, keunggulan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara produktif.

Di Indonesia, angka IPM terus menunjukkan tren kenaikan dari periode ke periode berikutnya, tetapi angka pengangguran tidak mengalami penurunan secara seimbang. Hal tersebut mengindikasikan terdapat selisih antara progres kualitas sumber daya manusia dengan ketersediaan bidang kerja produktif. Fenomena ini memberikan tanda bahwa pembangunan manusia saja belum memadai, sehingga diperlukan kolaborasi dengan strategi pertumbuhan ekonomi yang merata dan pembukaan berbagai sektor industri padat karya. Oleh karena itu, pembangunan

manusia harus diselaraskan dengan kebijakan perluasan lapangan kerja supaya pengaruh positif IPM terhadap penurunan angka pengangguran dapat terealisasi secara maksimal (Rosyid *et al.*, 2025).

2.1.5.1 *Human Capital Theory*

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh (Becker, 1965) memandang manusia sebagai bentuk modal yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi tertentu. Investasi di bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta aspek kesehatan akan meningkatkan produktivitas individu sehingga memperbesar kesempatan mereka dalam memperoleh pekerjaan sekaligus menekan potensi pengangguran. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas modal manusia, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Konsep modal manusia dasarnya mengakui bahwa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari investasi yang dilakukan, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh masyarakat. (Budiarty, 2006) modal manusia mencakup seluruh kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan atribut individu yang memungkinkan mereka untuk menciptakan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Berbeda dengan modal fisik seperti mesin atau bangunan yang bisa aus dan rusak, modal manusia justru dapat terus berkembang dan meningkat nilainya melalui proses pembelajaran berkelanjutan dan pengalaman kerja. Investasi dalam modal manusia ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan eksternalitas positif bagi masyarakat luas melalui peningkatan produktivitas dan inovasi (Dewi *et al.*, 2025).

Konteks pasar tenaga kerja, teori ini menekankan bahwa sektor pendidikan serta pelatihan bukan hanya sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan suatu bentuk pengembangan kualitas individu yang akan memberikan keuntungan di masa mendatang. Individu yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat produktivitas lebih besar karena mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit. Hal ini membuat mereka lebih diminati oleh pemberi kerja dan mempunyai

posisi tawar yang lebih kuat dalam penentuan tingkat upah. Investasi pada kesehatan juga tidak kalah penting, karena pekerja yang sehat memiliki stamina dan konsentrasi lebih baik, tingkat absensi lebih rendah, dan usia produktif yang lebih panjang. (Saputra & Juliannisa, 2025) individu yang memiliki modal manusia tinggi baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja dan lebih mudah terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

Menurut (Schultz, 1962), tidak semua investasi pendidikan menghasilkan peningkatan produktivitas yang sama karena kualitas institusi pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar, dan kemampuan individu dalam menyerap pengetahuan sangat bervariasi. Schultz menekankan bahwa investasi modal manusia akan efektif menurunkan pengangguran hanya jika terdapat keselarasan antara *output* sistem pendidikan dengan struktur permintaan tenaga kerja di pasar. Ketidakselarasan ini menjadi tantangan utama pada sejumlah negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terutama pada bagian pola pendidikan masih berorientasi pada pengetahuan teoritis dan kurang memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Akibatnya, meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat, kesenjangan mengenai kompetensi yang dikuasai oleh para lulusan dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan (*skill mismatch*) tetap menjadi masalah serius yang menyebabkan pengangguran terdidik terus meningkat (Aulia *et al.*, 2025).

Teori *Human Capital* memberikan landasan untuk menganalisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat pengangguran. IPM yang mencerminkan investasi pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup seharusnya dapat menurunkan pengangguran seiring meningkatnya produktivitas serta daya saing tenaga kerja. (Becker, 1965) menegaskan bahwa alokasi sumber daya pada modal manusia tidak sekadar memacu produktivitas tiap individu, melainkan turut memberikan pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi secara makro lewat perbaikan mutu angkatan kerja. Penelitian (Sahara & Iryani, 2021) mengemukakan bahwa kenaikan IPM memiliki andil besar dalam menekan angka pengangguran melalui optimalisasi kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, teori ini memprediksi bahwa peningkatan IPM akan berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran, meskipun efektivitasnya amat dipengaruhi oleh kapasitas pasar

kerja dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang relevan terhadap kenaikan mutu tenaga kerja tersebut.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Kenaikan pada upah minimum dapat memberikan dampak dua arah pada sektor ketenagakerjaan. Di satu sisi, peningkatan upah tersebut mampu memperbaiki taraf hidup karyawan dan kekuatan belanja masyarakat yang pada akhirnya mendorong konsumsi dalam negeri dan permintaan barang secara keseluruhan. Ketika permintaan barang meningkat, perusahaan cenderung memperluas produksi dan membutuhkan tambahan sumber daya manusia sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Namun di perspektif lainnya, kenaikan upah juga berisiko menambah tanggungan biaya operasional unit usaha, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada pekerja. Kondisi ini bisa memicu perusahaan melakukan pengurangan staff, beralih ke teknologi otomatisasi yang lebih hemat tenaga kerja, atau bahkan memindahkan usahanya ke daerah dengan upah lebih rendah.

Penelitian (Marliana, 2022) mengungkapkan bahwa peningkatan standar upah minimum memberikan efek kurang baik terhadap penyerapan individu yang bekerja di sektor formal Indonesia, khususnya pada industri yang banyak menggunakan sumber daya manusia. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk membatasi jumlah staf atau menerapkan teknologi otomasi untuk menjaga tingkat keuntungan di tengah kenaikan biaya tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022) yang memaparkan bahwa efek upah minimum terhadap angka pengangguran sangat bertumpu pada kapasitas perusahaan dalam mengakomodasi kenaikan biaya dan daya adaptasi industri terhadap perubahan kebijakan pengupahan. Di beberapa sektor seperti tekstil dan garmen, kenaikan upah yang tidak diikuti oleh perbaikan efisiensi kerja malah memicu perusahaan memangkas jumlah pekerja atau memindahkan lokasi pabrik ke negara lain dengan upah yang lebih terjangkau seperti Vietnam dan Bangladesh.

Kaitan antara upah minimum dengan angka pengangguran terbuka juga dipengaruhi oleh pembagian sektor tenaga kerja di Indonesia yang terbagi menjadi sektor formal

dan informal. Kenaikan upah minimum yang hanya diwajibkan pada lingkup formal dapat memicu perpindahan pekerja menuju sektor informal yang tidak memiliki jaminan upah dan perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, kebijakan upah minimum mesti disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi ekonomi di daerah, daya saing sektor industri, dan tingkat produktivitas tenaga kerja supaya bisa memberikan kepastian bagi kaum buruh tanpa memperbanyak jumlah pengangguran. (Simbolon et al., 2023) menegaskan bahwa besaran upah minimum memiliki dampak nyata terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, sehingga pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pengupahan dengan program penguatan kualitas dan kemampuan para pekerja supaya efek kurang baiknya bagi ketersediaan lapangan kerja bisa dikurangi.

2.2.2 Hubungan Ekspor terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Ekspor menjadi salah satu instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan tingkat keterlibatan suatu wilayah pada aktivitas pengiriman barang serta jasa di pasar global. Aktivitas ekspor yang meningkat menunjukkan kapasitas produksi nasional yang tinggi dan daya saing industri domestik yang kuat. Dalam Teori Heckscher-Ohlin (1933), ekspor dapat mendorong spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif suatu wilayah. Negara yang memiliki faktor produksi melimpah seperti sumber daya manusia di Indonesia cenderung mengeksport produk padat karya seperti tekstil, pertanian, dan manufaktur ringan. Ekspansi sektor ekspor ini mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran melalui kenaikan permintaan terhadap tenaga kerja di berbagai bidang produktif.

Penelitian (Susanti, 2019) menunjukkan bahwa peningkatan volume ekspor memberikan pengaruh nyata terhadap daya serap tenaga kerja pada sektor industri Indonesia, yang menegaskan bahwa perdagangan internasional berperan sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi dan penyedia lapangan kerja baru terutama pada sektor padat karya. Hal ini sejalan dengan temuan (Djunaidi & Alfitri, 2022) yang menguraikan bahwa semakin tingginya partisipasi Indonesia dalam perdagangan global memberikan pengaruh baik bagi pasar tenaga kerja lewat peningkatan ekspor pengolahan serta barang unggulan nasional. Selanjutnya,

penelitian (Pramesti, 2023) menemukan bahwa peningkatan ekspor memiliki kaitan erat dalam menurunkan angka pengangguran untuk periode yang lama, sementara impor berlebih justru meningkatkan pengangguran karena menekan daya saing produk domestik.

Hubungan antara ekspor dan tingkat pengangguran terbuka bersifat positif apabila kegiatan ekspor didorong pada sektor-sektor yang padat karya serta memiliki nilai kompetitif yang kuat di kancah internasional. Di Indonesia, efek positif ekspor terhadap penurunan pengangguran terjadi apabila ekspor tumbuh lebih cepat dibanding impor dan didukung oleh peningkatan kapasitas industri domestik. Namun, apabila ekspor berfokus pada bidang yang mengutamakan penggunaan mesin atau yang berbasis pada pengolahan sumber daya dengan tingkat penyerapan sumber daya manusia yang minim. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan ekspor dengan memperkuat industri manufaktur padat karya, memperluas diversifikasi produk ekspor, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional agar manfaat perdagangan internasional dapat berkontribusi optimal dalam menekan angka pengangguran terbuka di wilayah Indonesia.

2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi permasalahan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Secara teoritis, PMA diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui pembangunan fasilitas produksi baru, transfer teknologi, dan pengembangan industri pendukung yang menciptakan *multiplier effect* terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, dampak PMA terhadap pengangguran juga tergantung pada karakteristik investasi, intensitas teknologi yang digunakan, dan kapasitas SDM setempat dalam menyesuaikan diri dengan sistem teknologi terkini yang diperkenalkan oleh penanam modal dari luar negeri.

Penelitian (Tanaya & Suyanto, 2023) menganalisis peran PMA terhadap jumlah pengangguran usia muda Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, PMA dapat meningkatkan pengangguran pemuda karena proses realokasi industri

yang memerlukan penyesuaian tenaga kerja dan adanya ketidaksesuaian keterampilan antara kebutuhan investor asing dengan kualifikasi tenaga kerja lokal. Namun, dalam jangka panjang, PMA secara signifikan mengurangi pengangguran pemuda dengan menciptakan peluang kerja baru dan memperbaiki mutu sumber daya manusia melalui skema pelatihan dan transfer teknologi. (Firmansyah *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa penanaman modal, termasuk PMA, menjadi kegiatan krusial guna memperoleh pembiayaan bagi proyek-proyek yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif pada penyelesaian masalah pengangguran, terutama melalui penciptaan sektor-sektor ekonomi baru yang bisa menampung pekerja dengan kuantitas yang banyak dan menyokong kemajuan ekonomi berkelanjutan.

2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara yang pada akhirnya memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. IPM menggambarkan tingkat capaian pembangunan penduduk melalui tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang memadai. Ketiga dimensi tersebut menentukan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi secara efektif. Peningkatan IPM menunjukkan membaiknya mutu sumber daya manusia yang diproyeksikan mampu mengurangi jumlah pengangguran melalui penguatan efisiensi kerja dan kompetensi tenaga kerja.

SDM yang memiliki mutu tinggi memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja, mereka memiliki kemampuan lebih baik untuk menyesuaikan diri, dengan perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan (Sugiyanto *et al.*, 2024). Masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi serta memiliki kondisi kesehatan prima cenderung lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah. Namun, peningkatan IPM tidak selalu berdampak langsung pada penurunan pengangguran karena sangat bergantung pada adanya kesempatan kerja yang sepadan dengan kompetensi pekerja yang semakin baik.

Penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan IPM dengan pengangguran. (Astrid & Soekapdjo, 2020) menjelaskan bahwa kenaikan nilai IPM memberikan pengaruh terhadap berkurangnya angka pengangguran lewat perbaikan kualitas modal manusia. Temuan ini sejalan dengan gagasan Teori *Human Capital* yang menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas manusia menjadi langkah strategis untuk mengurangi pengangguran. Dengan demikian, peningkatan IPM dapat menurunkan pengangguran melalui perbaikan efisiensi kerja serta kemampuan kompetitif pekerja, hanya saja efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan perekonomian untuk membuka kesempatan kerja yang sepadan dengan kompetensi pekerja yang semakin meningkat.

2.3 Tinjauan Empiris

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ginting <i>et al.</i> (2025)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia	Teknik Pengolahan Data Menggunakan Model Regresi Linear Berganda, <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Suku bunga investasi memiliki pengaruh negatif serta berarti bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sementara itu, ekspor, Inflasi, dan PMDN memiliki pengaruh positif namun tidak memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2.	Sulistiana <i>et al.</i> (2025)	Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 2015-2023	Proses pengolahan regresi data panel, dengan pendekatan (CEM), (FEM), dan (REM).	Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan PMA terkonfirmasi memberikan dampak negatif yang nyata terhadap pengangguran. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia menunjukkan pengaruh positif yang berarti bagi pengangguran di 33 Provinsi Indonesia.
3.	Permatasari <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan	Metode Analisis Regresi Linear Berganda, <i>Ordinary</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMP mempunyai pengaruh yang nyata bagi tingkat pengangguran terbuka, variabel inflasi tidak memiliki pengaruh

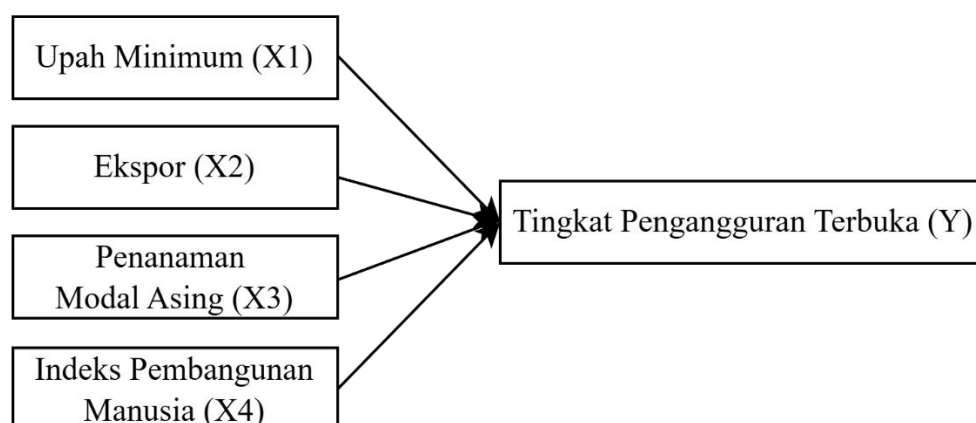
No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023	<i>Least Square</i> (OLS).	yang berarti pada tingkat pengangguran terbuka, dan variabel TPAK tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.
4.	Sahrul <i>et al.</i> (2023)	Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1993-2022	Metode Pengolahan <i>Error Correction Model</i> (ECM).	Hasil Penelitian menunjukkan variabel Ekspor, PMA berpengaruh positif dan memberikan dampak nyata terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.
5.	Simbolon <i>et al.</i> (2023)	<i>Analysis Of The Effect Of Hdi, Regional Minimum Wage And Labor Force Participation Rate On Open Unemployment In Indonesia 2019-2022</i>	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif serta deskriptif, dengan teknik Regresi Data Panel.	Merujuk pada temuan data, seluruh faktor IPM, UMP, dan TPAK secara bersama-sama memiliki dampak yang nyata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
6.	Tanaya & Suyanto, (2023)	<i>Investigating the Role of Foreign Direct Investment on Youth Unemployment Rate in Indonesia 1991-2019</i>	Metode analisis menggunakan teknik <i>Auto-Regressive - Distribution-Lag</i> (ARDL).	FDI di Indonesia dapat menyediakan peluang kerja bagi kaum muda. FDI memiliki pengaruh negatif serta nyata terhadap pengangguran kaum muda perempuan. Di sisi lain, tidak ditemukan dampak yang berarti pada pengangguran kaum muda laki-laki.
7.	Marliana, (2022)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di	Metode Analisis Regresi Linear Berganda, <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) tidak memberikan dampak yang nyata terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan pertumbuhan ekonomi (PE) dan upah minimum (UM) provinsi terbukti memiliki pengaruh

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Indonesia Tahun 2006-2020		yang berarti terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
8.	Putri & Shiddiqie, (2022)	Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015-2020	Analisis regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Teknologi memberikan dampak negatif terhadap Tingkat Pengangguran, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak memiliki kaitan yang nyata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
9.	Alalawneh & Nessa, (2020)	<i>The Impact of Foreign Direct Investment on Unemployment: Panel Data Approach</i>	Analisis regresi melalui pendekatan data panel dan <i>Vector Auto Regression (VAR)</i>	Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa faktor FDI, Ekspor, dan Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penganggura.
10.	Astrid & Soekapdjo, (2020)	Pengaruh inflasi, jumlah penduduk, ipm, pma, dan pmdn terhadap tingkat pengangguran di Indonesia Tahun 2014-2017	Metode yang digunakan regresi dengan data panel	Inflasi menunjukkan pengaruh positif serta berdampak nyata pada angka pengangguran. IPM serta PMA terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan bagi jumlah pengangguran di Indonesia. Sementara itu, total penduduk dan PMDN ditemukan tidak memiliki kaitan nyata terhadap angka pengangguran di Indonesia.

2.4 Kerangka Berpikir

Alur pemikiran dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang dipengaruhi oleh variabel makroekonomi. Upah minimum dipandang sebagai salah satu komponen krusial karena kenaikannya dapat memperkuat daya beli masyarakat serta membuka peluang kerja

baru, namun juga dapat menambah pengeluaran operasional perusahaan yang berpotensi mendorong pengurangan tenaga kerja terutama pada industri yang banyak menggunakan pekerja. Selanjutnya, Ekspor diharapkan mampu memperluas pasar, meningkatkan perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja baru sebagaimana dijelaskan dalam Teori Heckscher-Ohlin, meskipun di sisi lain dapat pula menimbulkan pengangguran struktural jika industri domestik tidak mampu bersaing dengan produk impor. Penanaman Modal Asing (PMA) berperan penting dalam menyerap tenaga kerja melalui investasi, peningkatan produktivitas, dan pembukaan sektor usaha baru, meskipun efeknya dapat berbeda apabila investasi lebih banyak dialokasikan pada industri yang mengutamakan teknologi mesin daripada tenaga manusia. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi elemen strategis karena merepresentasikan mutu masyarakat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, serta taraf hidup yang berpengaruh pada kompetensi pekerja di pasar tenaga kerja, namun peningkatan IPM tidak selalu otomatis menurunkan pengangguran jika tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menguji pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Indonesia untuk rentang waktu 1990–2023 secara individu maupun bersama-sama dalam kurun waktu lama melalui metode *Ordinary Least Square* (OLS).



Gambar 12. Kerangka Berpikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan sementara yang disusun guna memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam riset sesuai dengan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, tahapan pengujian hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh negatif Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif Ekspor terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
3. Diduga terdapat pengaruh negatif Penanaman Modal Asing terhadap tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.
4. Diduga terdapat pengaruh negatif Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik sistematis guna memperoleh data agar dapat dipaparkan, dibuktikan, serta dikembangkan untuk menemukan sebuah teori baru, yang bermanfaat dalam mengenali, menyelesaikan, sekaligus memprediksi suatu masalah (Sugiyono, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian yang diterapkan yakni pendekatan kuantitatif guna melihat besarnya kaitan antar variabel bebas terhadap variabel terikat memakai data angka yang diolah melalui *software Eviews 12*. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut ditujukan guna menganalisis pengaruh dari Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan data runtut waktu (*time series*). Menurut (Enders, 2010), data tersebut merupakan serangkaian hasil observasi yang dihimpun secara berurutan berdasarkan dimensi waktu dengan interval yang konsisten, dimana setiap pengamatan memiliki keterkaitan temporal satu sama lain. Data ini memberikan informasi mengenai perilaku variabel sepanjang periode waktu tertentu dan memungkinkan analisis dinamika hubungan antar variabel. Sejumlah variabel yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pengamatan data pada kurun waktu 1990 hingga 2023.

Tabel 3. Variabel, Simbol, Satuan dan Sumber Data

No.	Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Persen (%)	BPS
2.	Upah Minimum	UM	Rupiah (Rp)	BPS
3.	Ekspor	EKS	Persen (%)	<i>World Bank</i>
4.	Penanaman Modal Asing	PMA	Miliar Dollar	BPS
5.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Persen Indeks	UNDP

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Variabel

Variabel penelitian merupakan karakteristik atau atribut dari individu, objek, maupun aktivitas yang menunjukkan variasi nilai dan dipilih oleh peneliti untuk dikaji guna menarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Penjelasan operasional dari setiap yang dipakai dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

3.3.2 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel dependen adalah variabel yang keadaannya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain dalam kerangka penelitian, yang sering disebut sebagai variabel terikat atau variabel bebas (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah tingkat pengangguran terbuka.

3.3.2.1 Operasional Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase antara penduduk yang menganggur secara terbuka dibandingkan dengan total angkatan kerja yang tersedia. Variabel tersebut dipakai guna memantau persentase penduduk usia produktif yang sedang aktif mencari lapangan kerja namun belum memperolehnya dalam kurun waktu tertentu. Fenomena pengangguran ini merefleksikan adanya ketidakselarasan di pasar tenaga kerja sekaligus menjadi indikator utama dalam mengukur kondisi sosial ekonomi makro di suatu negara.

3.3.3 Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel independen merupakan faktor yang memberikan pengaruh atau memicu munculnya perubahan pada variabel dependen, yang dalam berbagai literatur sering

diidentifikasi sebagai variabel bebas ataupun penyebab utama variabel dependen. Adapun dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diposisikan sebagai variabel independen meliputi:

3.3.3.1 Upah Minimum

Upah Minimum merupakan standar bayaran bulanan paling rendah yang diputuskan oleh pemerintah, demi menjamin terpenuhinya hak buruh akan taraf hidup yang mencukupi sesuai aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan. Indikator ini merefleksikan batasan pendapatan terkecil yang wajib diperoleh tenaga kerja, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, produktivitas pekerja, serta keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.

3.3.3.2 Ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan produk berupa barang maupun jasa dari dalam negeri menuju pasar internasional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Variabel ini diukur dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan kontribusi relatif kegiatan ekspor terhadap perekonomian nasional. Peningkatan nilai ekspor mencerminkan tingginya permintaan internasional terhadap produk Indonesia, yang dapat memperluas skala pembuatan barang serta menambah jumlah penggunaan tenaga kerja pada bidang berorientasi ekspor.

3.3.3.3 Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing merupakan jumlah dana investasi secara langsung yang dialokasikan oleh investor luar negeri di wilayah Indonesia, dengan perhitungan dalam satuan miliar dollar. Variabel ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor internasional terhadap iklim investasi domestik dan berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan fasilitas produksi dan pengembangan sektor ekonomi baru.

3.3.3.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator keberhasilan kualitas hidup masyarakat yang dievaluasi berdasar pada tiga dimensi pokok, yakni taraf

kesehatan, tingkat pendidikan, serta kecukupan daya beli. Variabel ini diukur melalui angka persen indeks dengan rentang 0 hingga 1, dimana peningkatan indeks IPM merefleksikan keunggulan kapasitas tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai basis referensi pokok. Data tersebut merupakan keterangan yang sudah dihimpun, diolah, serta diarsipkan oleh pihak eksternal, tersedia dalam bentuk publikasi resmi, laporan berkala, atau basis data yang dapat diakses publik. Karakteristik jenis data ini ialah sudah melewati tahapan pemeriksaan dan pengabsahan oleh institusi pengumpul data serta memiliki kredibilitas tinggi untuk keperluan analisis akademik. Adapun metode perolehan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode tinjauan literatur dijalankan melalui penelaahan literatur akademik yang sesuai dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan penelitian sebelumnya untuk membangun fondasi teoretis yang kuat. Aktivitas ini meliputi analisis terhadap buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan determinan pengangguran dan dinamika pasar tenaga kerja.

2. Penelusuran Digital (*Internet Research*)

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui akses terhadap basis data resmi lembaga statistik dan organisasi internasional. Data utama didapatkan melalui rilisan publikasi Badan Pusat Statistik, *World Bank*, dan, UNDP dengan rentang waktu 1990-2023. Untuk mendukung analisis kontekstual, penelitian juga memanfaatkan sumber informasi digital yang kredibel dari portal berita ekonomi dan publikasi institusi penelitian terpercaya.

3.5 Metode Estimasi dan Analisis Data

Metode estimasi yang diterapkan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS), analisis menggunakan dengan cara regresi linear berganda (*multiple regression*). OLS adalah metode estimasi paling efisien, yang memberikan hasil standar deviasi

terbaik, dibandingkan metode estimasi lain. Untuk itu metode OLS dikenal memberikan hasil BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*). Persamaan regresi linier berganda merupakan suatu model persamaan yang menjelaskan korelasi antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Pada penelitian ini analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, *software* yang digunakan adalah *Eviews 12*.

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Penerapan uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi keberadaan gejala normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi dalam model regresi (Purnomo, 2016). Sebuah model regresi linier dikategorikan baik apabila mampu melewati serangkaian pengujian asumsi klasik. Pemenuhan asumsi tersebut sangat krusial guna menghasilkan model estimasi yang objektif dan hasil pengujian yang valid. Kegagalan dalam memenuhi satu kriteria saja akan mengakibatkan hasil analisis regresi tidak lagi memenuhi standar BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Asumsi klasik dalam kerangka regresi linear yang dianalisis pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas dalam kerangka regresi adalah untuk menganalisis apakah nilai residual yang diperoleh dari model tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Kualitas model regresi yang ideal ditentukan oleh adanya nilai residual yang menyebar secara normal. Proses evaluasi ini menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) dengan rujukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
- b) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan linear yang nyata antara sesama variabel independen di dalam model estimasi. Kriteria model regresi yang berkualitas ditandai dengan nihilnya korelasi yang signifikan di antara variabel-variabel penjelasnya. Jika ditemukan indikasi multikolinearitas, maka akurasi prediksi model tersebut akan menurun sehingga

berpotensi memicu kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Adapun pedoman dalam menentukan ada tidaknya gejala multikolinearitas mengacu pada kriteria berikut:

1. Apabila nilai $VIF < 10.00$, maka artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas.
2. Apabila nilai $VIF > 10.00$, maka artinya telah terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tahapan uji heteroskedastisitas dilakukan guna memastikan apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Jika variansi residual dari satu penelitian ke penelitian berikutnya tetap stabil, hal tersebut dikategorikan sebagai homokedastisitas. Sebaliknya, apabila variansinya berbeda, maka kondisi tersebut disebut heteroskedastisitas. Data yang memiliki standar kualitas yang baik adalah data yang bersifat homokedastisitas. Salah satu metode yang kerap digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah uji *Breusch-Pagan-Godfrey*. Model regresi yang valid seharusnya terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah kriteria dalam pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas:

1. Apabila nilai signifikansi > 0.05 , maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi < 0.05 , maka telah terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menganalisis apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila ditemukan keterkaitan tersebut, maka model memiliki permasalahan autokorelasi. Metode pengujian yang umum diterapkan adalah uji *Durbin-Watson* (DW) dengan standar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai d lebih rendah dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak, yang merefleksikan adanya permasalahan autokorelasi.
2. Apabila nilai d terletak di antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi.

3. Apabila nilai d berada di antara dL dan dU atau di antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan keputusan yang pasti.

Untuk meminimalisir bias parameter dari hasil estimasi *Ordinary Least Square* (OLS), maka selanjutnya akan menggunakan bentuk model atau teknik estimasi lain yang sesuai.

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda dengan OLS (*Ordinary Least Square*)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan beberapa variabel independen, yaitu Upah Minimum (UM), Ekspor (EKS), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada periode 1990–2023.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) digunakan karena menghasilkan estimator yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dengan syarat model regresi memenuhi uji asumsi klasik. Persamaan umum regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TPT = \alpha + \beta_1 UM + \beta_2 EKS + \beta_3 PMA + \beta_4 IPM + e_t$$

Keterangan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

UM = Upah Minimum (Rupiah)

EKS = Ekspor (Persen)

PMA = Penanaman Modal Asing (Dollar)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

α = Konstanta

$\beta_1-\beta_4$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

e_t = Error term

3.5.3 Pengujian Statistik

3.5.3.1 Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya nilai probability (F-Statistic). Variabel bebas secara simultan akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probability (F-Statistic) < 0.05 .

3.5.3.2 Uji t-Statistik

Uji t dilakukan supaya mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas terikat. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung yang didapatkan terhadap t tabel serta membandingkan nilai signifikansi. Uji ini dapat dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hipotesis yang ada diterima apabila $t_{hitung} > t_{hitung}$ atau nilai sig $< 0,05$.

3.5.3.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi menggambarkan korelasi antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) dalam sebuah model. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi ini berada antara 0 hingga 1. $0 \leq R^2 \leq 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum, Ekspor, Penanaman Modal Asing, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia periode 1990-2023 menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model HAC atau *Newey West Standard Error* untuk memperbaiki permasalahan pada estimasi. Berdasarkan temuan yang telah didapatkan, dapat diambil sejumlah penjelasan penting yang memberikan pemahaman mendalam mengenai pengangguran di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, Upah Minimum ditemukan memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, yang mengonfirmasi Teori Upah Minimum bahwa peningkatan standar pengupahan dapat menurunkan pengangguran melalui jalur penguatan daya beli masyarakat dan stimulasi permintaan agregat. Keberhasilan kebijakan upah minimum dalam menurunkan pengangguran sangat ditentukan oleh stabilitas inflasi yang terjaga, dimana pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada tahun 2014 berperan krusial dalam memastikan kenaikan upah nominal tidak tergerus oleh lonjakan harga sehingga peningkatan daya beli riil pekerja dapat terwujud secara nyata. Mekanisme transmisi kebijakan upah minimum ke penurunan pengangguran berlangsung melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong ekspansi produksi dan penyerapan tenaga kerja tambahan, sekaligus melalui perbaikan produktivitas pekerja yang memungkinkan perusahaan mempertahankan profitabilitas meskipun menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja. Formulasi kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi regional sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dengan keberlanjutan operasional perusahaan, sehingga dampak positif upah minimum terhadap penurunan pengangguran dapat terwujud tanpa menimbulkan gejolak struktural dalam pasar tenaga kerja.

Kedua, Ekspor menunjukkan korelasi positif namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap angka pengangguran terbuka. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai ekspor Indonesia tidak secara otomatis menciptakan lapangan kerja baru karena sektor ekspor masih didominasi oleh produk dengan kandungan teknologi dan inovasi yang rendah sehingga kurang mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Rendahnya daya saing ekspor Indonesia terjadi akibat minimnya investasi pada riset dan pengembangan teknologi sejak pertengahan dekade 2000-an, rendahnya produktivitas akibat kurangnya inovasi, serta munculnya kompetitor seperti Vietnam dan Bangladesh yang telah melakukan transformasi industri melalui peningkatan kapasitas teknologi. Ketergantungan pada komoditas primer dan produk dengan nilai tambah rendah membuat sektor ekspor tidak dapat berkembang optimal, sehingga pertumbuhan ekspor tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja yang memadai. Fenomena pertumbuhan tanpa pekerjaan atau *jobless growth* semakin memperjelas bahwa peningkatan nilai ekspor tidak selalu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang sebanding, terutama ketika sektor ekspor menerapkan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global. Ketidaksignifikanan pengaruh ekspor terhadap pengangguran menggarisbawahi urgensi reorientasi strategi perdagangan Indonesia dari mengejar nilai ekspor tinggi menuju ekspor berbasis inovasi dan produktivitas tinggi melalui percepatan program hilirisasi, peningkatan investasi pada riset dan pengembangan teknologi, serta diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak ekonomi global.

Ketiga, Penanaman Modal Asing ditemukan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sejalan dengan Teori Investasi Keynes yang menekankan peran krusial investasi dalam mencapai kondisi kesempatan kerja penuh melalui pembukaan lapangan kerja langsung dan efek pengganda ekonomi. Signifikansi dampak negatif PMA terhadap pengangguran

mengindikasikan bahwa aliran investasi asing ke Indonesia selama periode penelitian telah cukup efektif dalam menyerap tenaga kerja karena sebagian besar diarahkan ke sektor-sektor padat karya seperti manufaktur tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik yang memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia dalam ketersediaan tenaga kerja. Mekanisme penurunan pengangguran terjadi melalui jalur penciptaan lapangan kerja langsung pada fase konstruksi dan operasional perusahaan asing, serta melalui efek pengganda dimana kehadiran perusahaan multinasional menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa pendukung dari pelaku usaha lokal sehingga dampak terhadap penyerapan tenaga kerja meluas melampaui sektor penerima investasi langsung. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan zona industri yang dilengkapi infrastruktur memadai, ditambah dengan pemberian insentif fiskal strategis, telah berhasil meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi asing dan memaksimalkan kontribusi PMA terhadap penurunan pengangguran melalui penciptaan ekosistem industri yang kondusif bagi pertumbuhan sektor padat karya.

Keempat, Indeks Pembangunan Manusia ditemukan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, berbeda dari prediksi Teori Modal Manusia dan mengungkap permasalahan struktural mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dimana investasi besar-besaran pada pendidikan dan kesehatan justru meningkatkan pengangguran karena tidak diimbangi dengan transformasi struktur ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja berkualitas tinggi. Fenomena pengangguran terdidik menjadi manifestasi utama dari ketidaksesuaian fundamental antara *output* sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dimana lulusan berpendidikan tinggi menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi karena struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor informal, pertanian tradisional, dan jasa produktivitas rendah yang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Kesenjangan antara kecepatan perubahan teknologi dalam dunia industri dengan kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum semakin memperlebar jurang antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri modern yang memerlukan keterampilan digital, analitik data, pemrograman, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat dinamis. Konsentrasi geografis lapangan kerja berkualitas di

kota-kota besar menciptakan *oversupply* tenaga kerja terdidik di wilayah perkotaan yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja memadai, sementara daerah-daerah dengan IPM rendah justru mengalami kekurangan tenaga kerja berkualitas, sehingga peningkatan IPM tidak otomatis menurunkan pengangguran apabila tidak disertai dengan pemerataan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, hasil uji simultan diketahui bahwa seluruh variabel bebas secara kolektif memiliki dampak yang nyata terhadap Angka Pengangguran Terbuka, sementara kemampuan model dalam menjelaskan variasi pengangguran menunjukkan bahwa keempat variabel yang diteliti memainkan peranan krusial dalam memberikan gambaran mengenai kondisi pengangguran di Indonesia, walaupun tetap ada faktor-faktor pendukung lainnya yang perlu dikaji dalam penelitian yang lebih mendalam. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan empat variabel makroekonomi dalam satu model analisis komprehensif selama lebih dari tiga dekade, tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori-teori ekonomi klasik dalam konteks Indonesia tetapi juga mengungkap kompleksitas dan permasalahan struktural yang terjadi dalam implementasinya. Persistensi pengangguran di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pada satu variabel saja, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan pengupahan, perdagangan internasional, investasi asing, dan pembangunan manusia secara simultan dengan mempertimbangkan karakteristik struktural ekonomi Indonesia untuk mencapai pengurangan pengangguran yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat sejumlah saran kebijakan yang bisa dijalankan oleh pihak pemerintah serta para pemangku kebijakan dalam menangani masalah pengangguran di Indonesia secara lebih efektif. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan temuan empiris penelitian serta karakteristik struktural perekonomian Indonesia.

Pertama, terkait kebijakan upah minimum, pemerintah perlu mempertahankan kerangka kebijakan pengupahan yang telah terbukti efektif dalam menurunkan

pengangguran dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. Koordinasi antara penetapan upah minimum dengan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah harus terus diperkuat untuk memastikan setiap kenaikan upah nominal benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penetapan upah minimum perlu disesuaikan tidak hanya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan tingkat produktivitas serta karakteristik industri di setiap wilayah. Program pendampingan bagi industri padat karya untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui modernisasi teknologi yang tetap mempertahankan karakteristik penyerapan tenaga kerja tinggi perlu diperkuat.

Kedua, mengoptimalkan kontribusi ekspor terhadap pengurangan pengangguran, pemerintah perlu melakukan reorientasi fundamental strategi perdagangan dari mengejar nilai ekspor tinggi menuju ekspor berbasis inovasi dan produktivitas tinggi melalui percepatan program hilirisasi untuk memproses bahan baku mentah menjadi barang jadi dengan kandungan teknologi modern. Peningkatan investasi pada riset dan pengembangan teknologi harus diperkuat untuk mendorong inovasi produk yang kompetitif di pasar global, didukung dengan pemberian insentif khusus berupa keringanan pajak dan akses pembiayaan berbunga rendah bagi industri yang mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas. Penguatan kandungan lokal dan pengembangan klaster industri berbasis teknologi yang mengintegrasikan perusahaan besar dengan usaha kecil menengah lokal harus didorong untuk meningkatkan keterkaitan dan daya saing sektor ekspor. Diversifikasi pasar ekspor harus diperluas tidak hanya ke negara maju tetapi juga ke pasar berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau dua pasar utama yang rentan terhadap gejolak ekonomi global.

Ketiga, kebijakan investasi asing perlu dirancang lebih selektif dengan memberikan prioritas dan insentif lebih besar bagi PMA yang berorientasi pada sektor padat karya dan memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Penguatan persyaratan kandungan lokal yang mewajibkan perusahaan asing menggunakan komponen dan bahan baku produksi lokal minimal 40% dari total input produksi harus diterapkan secara konsisten. Kewajiban transfer teknologi dan program pelatihan tenaga kerja lokal harus menjadi komponen wajib dalam setiap

persetujuan investasi asing. Pembentukan klaster industri yang mengintegrasikan perusahaan asing dengan usaha kecil dan menengah lokal perlu didorong untuk memaksimalkan efek pengganda investasi. Penyebaran investasi ke seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan insentif khusus untuk investasi di luar Jawa perlu diperkuat.

Keempat, mengatasi permasalahan pengangguran terdidik akibat peningkatan IPM memerlukan reformasi menyeluruh sistem pendidikan nasional agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan industri modern. Pembaruan kurikulum secara berkala dengan memasukkan keterampilan digital, coding, analitik data, dan kompetensi teknologi terkini harus menjadi prioritas utama dengan melibatkan praktisi industri. Penguatan pendidikan vokasi melalui penyediaan fasilitas pelatihan berstandar industri dan pengembangan program magang terstruktur minimal 6 bulan perlu dipercepat implementasinya. Integrasi sertifikasi kompetensi industri dengan ijazah formal harus dilakukan untuk menjamin lulusan memiliki keterampilan praktis yang langsung dapat diaplikasikan. Transformasi struktur ekonomi menuju industri berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik harus menjadi agenda pembangunan jangka menengah melalui pengembangan ekosistem inovasi yang kondusif.

Kelima, untuk penelitian di masa mendatang, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar memperluas lingkup analisis dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berkaitan seperti teknologi dan otomasi, struktur demografi, kualitas institusi pemerintahan, dan tingkat korupsi yang dapat mempengaruhi dinamika pengangguran. Penelitian yang memanfaatkan data dari tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat menyajikan ulasan yang lebih mendalam terkait perbedaan dampak dari variabel-variabel ekonomi terhadap angka pengangguran di tiap-tiap daerah di Indonesia, sementara analisis dengan metode ekonometrika yang lebih baik seperti *Vector Error Correction Model* (VECM) atau *Structural Vector Autoregression* (SVAR) dapat digunakan untuk menangkap dinamika jangka pendek dan jangka panjang secara lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang mendalam juga diperlukan untuk memahami mekanisme dan proses yang mendasari hubungan statistik yang ditemukan sehingga dapat memberikan

rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi penyelesaian masalah pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>
- Al'anam, M., & Armadani. (2025). Legal Ambiguity Pengecualian Pembayaran Upah Minimum Bagi Pengusaha Mikro dan Kecil Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 18–36. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1806>
- Alviro, A. B., Widawati, A. S., & Nurnilawati, E. (2025). *Determinants of Income Inequality in the Special Region of Yogyakarta*. 25(2), 225–235.
- Amrulloh, M. R. K. (2023). Trade Openness Studies In ASEAN-5 And It's Effect On Unemployment. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.17509/jpei.v5i2.62962>
- Andrews, D. W. K. (1991). Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858. <https://doi.org/10.2307/2938229>
- Andriany, V., Aprimayana, S., & Desfikasari, A. (2025). *Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. 3.
- Apriliani, A. P. (2024). Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Angkatan Kerja Sebagai Variabel Moderasi Tahun 1993-2022 Angela. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 181–190.
- Ardhana, A. Y. A., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., & Gunawan, A. (2025). Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(4), 1020–1026. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v3i4.156>
- Asmara, G. D., Saleh, R., & Asmara, G. J. (2024). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2020. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/aaem.v1i3.218>
- Astrid, E., & Soekapdjo, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, IPM, PMA, dan PMDN terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 22(2), 319–325.
- Aulia, A. N., Negeri, U., Khoirul, S., Rahma, S., Ardiansyah, M. A., Karim, M. Y., & Farliana, N. (2025). Pengaruh Pendidikan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Industri Manufaktur. *Jurnal Sains Student Research*, 3(3), 360–368. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4753>
- Azzahra, S. F., Putri, L. D., Purba, F. Y., Tanjung, D., Rezkitaputri, A., & Zulva, R. Z. D. (2024). Dampak Pengangguran terhadap Stabilitas Sosial dan Perekonomian Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu*

- Ekonomi*, 2(4), 220–233.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia 2024. *Badan Pusat Statistik*, 19(73), <https://news.ge/anakliis-porti-ariss-qveynis-momava>.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2023. In *Badan Pusat Statistik*.
- Bakara, S., Simamora, E., Sarah, K., Siahaan, A., & Alawiyah, K. (2024). *Teori Heckscher-Ohlin (HO)JETBUS Journal of Education Transportation and BusinessE-ISSN: 3062-8121 P-ISSN: 3062-813XVol. 1 No. 2 Desember 2024. Teori Heckscher-Ohlin: Model Perdagangan Internasional(Sarah Bakara1 Enjelika Simamora2 Karin Sarah Angelina. 1(2), 612–616.*
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. In *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi RPJMN IV 2020-2024_Revisi 28 Juni 2019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi_RPJMN_IV_2020-2024_Revisi_28_Juni_2019.pdf)
- Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029*.
- Becker, G. S. (1965). Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. *Revue de l'Institut International de Statistique / Review of the International Statistical Institute*, 33(3), 556. <https://doi.org/10.2307/1401709>
- BPS. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 2023. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2023.html>
- Budiarty, I. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Manusia. Universitas Lampung: Bandar Lampung*.
- Case, K. E. (2007). *Prinsip-prinsip ekonomi jilid 1* (8th ed.). Erlangga.
- Dewi, N. K. A. P., & Sirait, T. (2024). Pemodelan Tingkat Pengangguran Usia Muda di Indonesia Tahun 2015-2021 dengan FEM SUR. *Limits: Journal of Mathematics and Its Applications*, 21(1), 71. <https://doi.org/10.12962/limits.v21i1.16965>
- Dewi, R. S., Ari Pradhanawati, & Ngatno. (2025). Human Capital Readiness, Learning Orientation, and Innovation Performance in Creative Industries in Central Java. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 16(1), 41–57. <https://doi.org/10.15294/jdm.v16i1.13576>
- Dian Safitri, R., & Rezza, M. (2025). Membedah Tren Tingginya Angka Pengangguran Terbuka Pada Gen Z Di Indonesia. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1–4. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Djamin, zulkifli. (2020). Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Manajemen*, 9(1), 137–146.
- Djunaidi, D., & Alfitri, A. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.29210/020221222>
- Dwi, W., & Aisyah, S. (2023). Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Pulau Sumatera. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 33–43. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10186>
- Eko PRASETYO, P., & Nur CAHYANI, E. (2022). Investigating Keynesian

- Theory in Reducing Unemployment and Poverty in Indonesia. *Nur CAHYANI / Journal of Asian Finance*, 9(10), 39–0048. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no10.0039>
- Enders, W. (2010). *Applied Econometric Times Series: STUDENTS' RESOURCE GUIDE TO ACCOMPANY*. 517. <http://books.google.com/books?id=uuCngEACAAJ&pgis=1>
- Fatkhu Rohman, Lailatul Fitriah, Santo Ardiyanto, Bagus Eka Narendra, dan S. (2024). *Analisis Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat*. 1(4), 282–290.
- Fikri, I., & Anis, A. (2023). Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i1.14419>
- Firmansyah, M. F., Maulana, H. Z., Sunarya, Z. F., & Zahra, F. (2023). *Pengaruh Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Serta Lingkungan di Indonesia*. 20(2), 10–26.
- Fitrahwaty, Handayani, A., Rinaldi, & Septian, Y. (2022). Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(3), 160–168. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p160-168>
- Ginting, R. S., Tarigan, W. J., & Sinaga, M. (2025). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia*. 13(2), 106–118. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/ilman>
- Hasanah, T. U. (2025). Pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Investasi Asing dan Peningkatan Lapangan Kerja di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 9(2), 612–624. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.3913>
- Herdianti, L., & Wahyudi, S. T. (2020). Tax Holiday and Foreign Direct Investment In Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(2), 177. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i2.16811>
- Humaira, M., Batubara, M., & Yusuf, M. (2022). UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KOTA BINJAI di TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2312–2323. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4990>
- ILO. (2023). *Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)*. www.ulandssekretariatet.dk
- Iman, M. N., & Hakim, M. F. (2025). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdep.v9i1.754>
- Jeyarajah, S. (2024). Heckscher-Ohlin's Theory of International Trade and its Evaluation. *International Journal of Research*, 11(December), 38–42.
- Kardono, N. H. (2004). Teori Ekonomi Makro Pendekatan Grafis Dan Matematis. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 5–13.
- Keynes, J. . (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf//semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Kurniawan, C. M. N., & Samsuddin, M. A. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan

- Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(6), 300–310. <https://jurnalisticomah.org/index.php/jemb/article/view/5044>
- Lailatul Qamariyah, Mardianita W.P, O., & Rusgianto, S. (2022). Pengaruh IPM, Investasi, dan UMP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2013-2020. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.1-15>
- Larasati Erlynda Rizky. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Populasi dan Investasi Asing Langsung Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis, Dan Teknologi (AMBITEK)*, 7083(2), 191–199.
- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 483–493.
- Maharani Barus, S., Maimunah, E., Herlina Sitorus, N., & Emalia, Z. (2025). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sentra Industri Genteng Di Kabupaten Lampung Tengah*. 6(2), 101–113.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics*. Macmillan Learning. <https://books.google.co.id/books?id=Ek6SugEACAAJ>
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Martin, R. (2008). *The Consequences of Doubling the Minimum Wage : The Case of Indonesia*. 54(4), 864–881.
- Matondang, K. A., Pasaribu, R. P., & Sinaga, F. A. (2025). *Peranan Penanaman Modal Asing dalam Perekonomian*. 4(2), 8610–8614.
- Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Purwaningsih, V. T., & Suparta, I. W. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022. *Analisis*, 13(2), 228–245. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2874>
- Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2), 167–190. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Padillah, R., & Saputra, R. (2024). Youth unemployment phenomenon in Indonesia: A growing threat to food security and social stability. *Journal of Public Health*, 46(4), e707–e708. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdae204>
- Pasuria, S., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(6), 795–808. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Permata, D. A., Margiyanata, H. M., Bani, L. S., & Noviarita, H. (2024). *The Influence Of Fiscal Policy and Public Consumption Expenditure On Economic Growth In Indonesia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Permatasari, D. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2023. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan*

- Kewirausahaan*), 8(3), 1179–1188. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i3.28267>
- Pramesti, I. G. A. A. (2023). Perkembangan Ekspor terhadap Dampak Pengangguran di Provinsi Bali. *Remik*, 7(1), 229–232. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i1.12026>
- Pratama Atiyatna, D., T. Muhyidin, N., & Bemby Soebyakto, B. (2019). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21. <https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8771>
- Priyanto, I. M., Firdausi, L., Ayuningtyas, N., & Sarpini. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Pengangguran*. 10(8).
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS: Untuk Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi. In *Cv. Wade Group*.
- Putra, A. P., Liana, D., & Conteh, M. L. (2022). Dampak Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics Development Issues*, 8(1), 52–67. <https://doi.org/10.33005/jedi.v8i1.381>
- Putri, R. N., & Ash Shidiqie, J. S. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2), 220–225. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss2.art9>
- Putri Valentine, Sabilayana Sabilayana, Andria Zulfa, Lia Nazliana Nasution, & Dwita Sakuntala. (2024). Minimum Wage, Inflation, Interest Rate and Household Consumption In Indonesia. *International Journal Of Accounting, Management, And Economics Research*, 2(1), 173–182. <https://doi.org/10.56696/ijamer.v2i1.35>
- Rahmatullah, D. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Likuiditas Perbankan di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3302–3310. <https://doi.org/10.62710/9wq2nd63>
- Ramadana, D., & Nuryadin, M. R. (2024). Analisis Determinasi Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus 11 Provinsi Tahun 2016-2020. *Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7, 4–6.
- Rasyida, N. U. (2021). Kajian Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia periode 1990-2019 (Aplikasi Hukum Okun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 2–13.
- Rini, E. F., & Septriani, S. (2025). Impact Analysis of Minimum Wages, Investments and Inflation on Labor Absorption in the Manufacturing Industry in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(1), 11–24. <https://doi.org/10.20473/jiet.v10i1.58541>
- Risqy, P. M. (2024). *Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Variable Makroekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52324/20313445.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Riza Ubihatun, Aninda Ilmi Aliyya, Fardi Wira, Viby Izmi Ardhelia, & Denny Oktavina Radianto. (2024). Tantangan dan Prospek Pendidikan Vokasi di Era Digital. *Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain*, 1(3), 01–11. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v1i3.118>
- Rizal, M., & Mustapita, A. F. (2024). Effect of minimum wages on labor, welfare and economic growth: Evidence from East Java province. *Optimum: Jurnal*

- Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 10–19.
<https://doi.org/10.12928/optimum.v14i1.8139>
- Rosyid, A., Sari, N., Sari, P. Z., Ariyani, Dharmani, I. G. A. A. N., Damayanti, E., Shabila, S., Rohani, S., Sarmilah, Damayanti, E., & Prastoeti, R. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia Periode 2021 - 2023. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(2), 111–123.
<https://doi.org/10.29138/jkis.v3i2.57>
- Safriadi, S., Masbar, R., & Syahnur, S. (2014). *Efektifitas Antara Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia : Pendekatan Model IS – LM*. 2(4), 85–96.
- Sahara, W. A., & Iryani, N. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 5(2), 94–102.
- Sahrul, S., Metekhoy, S., Pattilouw, D. R., & Sangadji, M. (2023). Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1993-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1785–1799.
<https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1242>
- Samsuddin, M. A. (2025). *Pengaruh inflasi, investasi asing dan ekspor terhadap tingkat pengangguran di indonesia*. 2(6), 19–25.
- Saputra, A. A., & Juliannisa, I. A. (2025). Faktor-Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Penajam Paser Utara. *Jurnal Edukasi Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*, 13(1), 2580–8818.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi>
- Saputri, S. A. A., & Sitorus, A. (2025). *Analisis Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi PMDN Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera*. 9(1), 251–267.
- Sari, A. R., Hakim, D. B., & Anggraeni, L. (2015). Dampak Keterbukaan Perdagangan dan Kinerja Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 4(2), 172–186.
- Sawitri, P., & Widarini, N. P. (2025). Fenomena Pengangguran Terdidik dan Pengaruhnya Bagi Bonus Demografi di Indonesia: Literature Review. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 4690–4701.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58189>
- Schultz, T. W. (1962). Investment in Human Beings. *The Journal of Political Economy*, LXX(5), 1–8.
- Sembiring, G. A. B., & Sukadana, W. (2025). Pola Perdagangan Indonesia Dengan Empat Mitra Dagang Utama Tahun 1990-2023. *Borjuis: Jurnal of Economy*, 2(4), 106–125.
<http://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/220%0Ahttps://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/download/220/224>
- Simbolon, C. M., Karo, R. U. K., & Daffa, D. S. (2023). Analisis Pengaruh IPM, UMP dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 451–463. <https://idm.or.id/JSER/index>
- Sirait, F. Y., Fitri, M., Harahap, I., Masharif Al-Syariah, J., Ekonomi, J., & Syariah, P. (2023). Markets Equilibrium: The IS-Lm Model. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1096–1105.
<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19072>

- Solihah, N., & Arisetyawan, K. (2025). *Pengaruh Upah, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat*. 5, 79–90.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). *Introduction to Econometrics*. <https://www.sea-stat.com/wp-content/uploads/2020/08/James-H.-Stock-Mark-W.-Watson-Introduction-to-Econometrics-Global-Edition-Pearson-Education-Limited-2020.pdf>
- Sudirman, Hidayat A, N., & Rahman, A. (2014). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Buhuts*, 18, 349–364. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/11090>
- Sugiyanto, R., Budiarty, I., & Yulawan, D. (2024). Analisis Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara ASEAN. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(4), 590–599. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i4.75>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sulistiana, A., Ananta, P., Suparta, I. W., & Darmawan, A. (2025). *Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pengangguran Di Indonesia*. 2(7), 2078–2087.
- Sunarto, N., Astuti, D., & Rita Maisyarah. (2020). ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BENGKALIS. *Konsep Desain Menentukan Hull Type, Material, Dan Propulsi Unmanned Surface Vehicle (Usv) Untuk Patroli Di Wilayah Rokan Hiir Dengan Metode Desicion Tree, Lcm*, 478–486.
- Susanti, E. (2019). Pengaruh Investasi, Ekspor, dan Tenaga kerja Asing Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2001-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3–15.
- Tanaya, O., & Suyanto, S. (2023). Investigating the Role of Foreign Direct Investment on Youth Unemployment Rate in Indonesia. *Binus Business Review*, 14(2), 121–131. <https://doi.org/10.21512/bbr.v14i2.8486>
- Teresia, D. M., Hastuti, D. R. D., Rahim, A., Astuty, S., & Rajab, A. (2025). Dampak Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik: Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa. *Jurnal E-Bis*, 9(2), 1094–1113. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v9i2.2707>
- Ulla, L. D. A., Arini, G. A., & Purwadinata, S. (2025). Pengaruh Pengembangan Keterampilan Digital dan Literasi Teknologi terhadap Kesempatan Kerja di Kalangan Milenial Kota Mataram. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(4), 666–686.
- Ummah, S. S., & Yasin, A. (2021). the Effect of Minimum Wage, Investment, Grdp, and Technology Index on Indonesian Labor Absorption. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i1.26553>
- United Nations Development Programme. (2024). Human Development Report 2023-2024. In *European Union (EU)*. (2024). *EU Missions and Operation*.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Wiganepdo, S., & Soegoto, H. (2022). *Peran Pmdn Dan Pma Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan Di Indonesia*. 12(1), 1–15.
- World Bank. (2023). *Exports of goods and services (% of GDP)*.
- Yien, L. C., Abdullah, H., & Azam, M. (2019). Monetarism or Keynesian Discourse

in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 367–385.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1576854>